



LAKIP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
INSPEKTORAT

Jl. Lintas Sumatera KM. 2 Pulau Punjung Telp. 0754-451440 Fax. 0754-451492
Website : //http.dharmasraya.go.id Email : lrdharmasraya@yahoo.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2020

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pulau Punjung, 09 Maret 2021

Plt. INSPEKTUR,

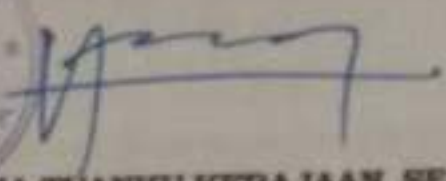
KANDAM, S.Sos
NIP. 19670607 199103 1 004

H. TAN HISKA TUANKU KERAFAH, SE
Deputy Chairman of the Board of Directors

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari partisipasi, kerjasama serta kerja keras semua pihak yakni masyarakat, dunia swasta dan aparat pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.



Akhirnya atas kontribusi tersebut kepada semua pihak kami ucapkan terimakasih.

Pada Pagi, Maret 2021
BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE



IKHTISAR EKSKLUSIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Daerah untuk mendorong tatakelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi. Pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus memuat visi, misi Kepala Daerah, termasuk tujuan dan sasaran serta tolok ukur /Indikator kinerja Utama yang jelas dapat diukur, diuji dan diandalkan atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai guna perwujudan Visi **MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA** bermakna Hadirnya di Kabupaten Dharmasraya pada priode 2016-2021 yang memuat misi tugas :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan,perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun.



Misi-misi tersebut diatas dalam LKjIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang. Melalui langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas sebagai perangkat negara dalam pelaksanaa dan Revolusi mental Bangsa. Kemudian dari pada itu yang pasti masyarakat mendapatkan hasil dari Kinerja Instansi Pemerintah itu sendiri.



Surat Pernyataan telah di Reviu oleh APIP	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	V
Bab I PENDAHULUAN	
A. Dharmasraya Sekilas	1
B. Kependudukan dan tenaga kerja	2
C. Riwayat Kabupaten Dharmasraya	6
D. Permasalahan di Kabupaten Dharmasraya	8
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
A Visi dan Misi	9
B Perjanjian Kinerja	12
Bab III KINERJA Daerah	
A Pengukuran Kinerja	15
B Realisasi Anggaran	50
C Efektifitas Kepegawaian	54
D Inovasi Daerah	55
Bab IV PENUTUP	56
Lampiran :	
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

BAB I

PENDAHULUAN



A. Dharmasraya Sekilas

Dharmasraya adalah nama sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Letak geografis Kabupaten Dharmasraya 00048'25,4"- 1041'40,3" LS dan 10108'32,5"-101053'30,2" BT.. Luas wilayah berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 adalah 2.961,13 Km² (296.113 Ha). Sebesar 87,4% dari luas wilayahnya merupakan lahan pertanian, sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 3.025,99 km² (302.599) Ha.

Dengan posisi sangat strategis berada di segitiga emas Sumbar, Riau dan Jambi, persisnya di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Batas sebelah selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Batas sebelah timur dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan batas sebelah barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan di Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 wilayah administrasi Kecamatan dan 52 Nagari atau pemerintahan setingkat Desa. Selain itu untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten (Pembab) Dharmasraya menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Perda tersebut Pembab membentuk 18 dinas daerah, 3 (tiga) badan dan 1 (Satu) kantor. Dengan komposisi tersebut diharapkan pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik.

Dilingkungan legislatif, ada 30 anggota DPRD yang berasal dari 10 partai politik. Sebagian dari anggota legislatif telah duduk sebagai anggota DPRD dalam beberapa periode. Dan juga sebagian besar anggota DPRD adalah berpendidikan sarjana. Dengan demikian, kualitas legislatif dianggap cukup mumpuni untuk bekerjasama dengan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan guna mewujudkan cita cita pembangunan.



Untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemkab DharmaSraya memiliki 3.493 Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah, baik sebagai pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pelaksana. Dilihat dari golongannya, sebagian besar ASN yang ada merupakan pegawai golongan III dengan pendidikan sarjana. Ini berarti, secara umum ASN di Kabupaten DharmaSraya memiliki kemampuan cukup untuk mengemban tugas di lingkungan masing masing

Dari segi Pendidikan, sebanyak 2485 orang atau 71,14% dari seluruh ASN di lingkungan Kabupaten DharmaSraya merupakan lulusan pendidikan strata I, 561 orang dengan jenjang pendidikan diploma, dan hanya 0,68 % yang berasal dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama

B. Gambaran Penduduk DharmaSraya

Sebagian besar wilayah Kabupaten DharmaSraya telah dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pertanian, mulai tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yang mencapai 87,74 persen dari total luas wilayah.

Pemanfaatan lahan untuk pengembangan usaha ini telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian. Dengan memanfaatkan lahan, khususnya untuk pengembangan sektor pertanian secara luas, maka kebutuhan pangan dan papan masyarakat telah terpenuhi. Selain itu, usaha pertanian yang dilakukan juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di daerah ini. Dengan membaiknya pendapatan, maka masyarakat dapat mengakses pendidikan, kesehatan dan pelayanan lainnya dengan lebih baik. Ini terlihat dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten DharmaSraya Tahun sebesar 71,52.



ASN Golongan I&II : 467 Orang

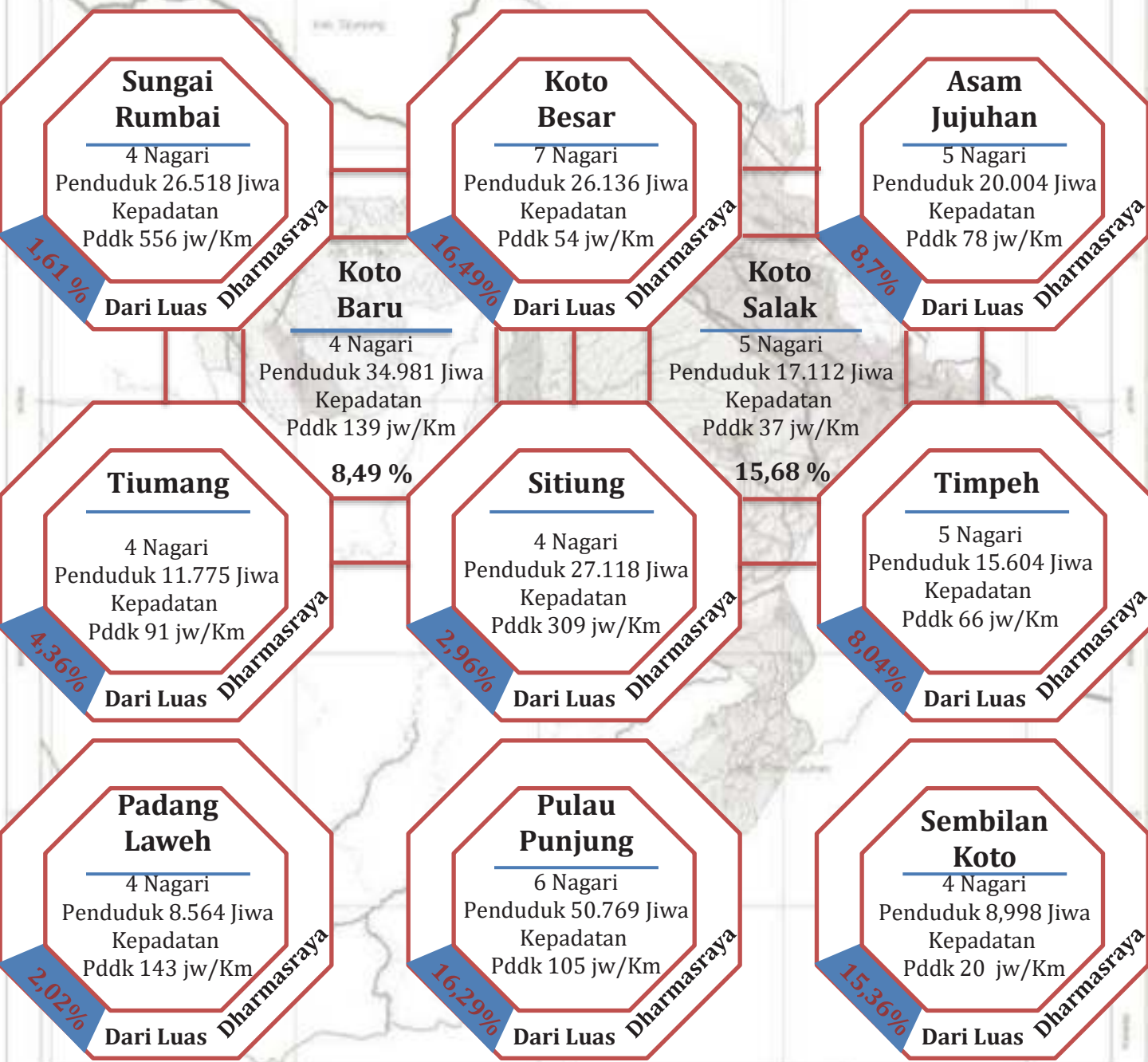


ASN Golongan III : 2.347 Orang



ASN Golongan IV : 679 Orang

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: BPS Dharmasraya;2020

Kabupaten Dharmasraya dihuni oleh 247.579 jiwa penduduk, terdiri dari penduduk laki-laki 128.401 jiwa dan penduduk perempuan 119.178 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dengan sex ratio 107,74. sementara jumlah penduduk terbanyak adalah pada usia produktif yaitu usia 25-29 tahun dan juga usia Balita. Sedangkan untuk kepadatan penduduk, Kecamatan Sungai Rumbai dimana setiap kilometer wilayahnya dihuni oleh 556 jiwa. Dengan komposisi demikian, jumlah angkatan kerja dan jumlah kebutuhan lapangan kerja menjadi permasalahan utama dalam sosial ekonomi masyarakat.

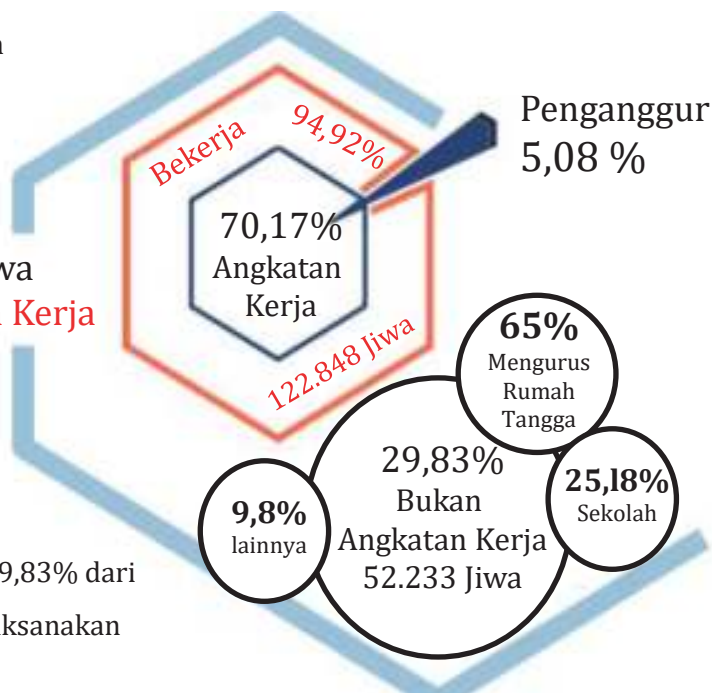
Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, air minum, protein dan energi juga terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya, angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah serta usia harapan hidup terus meningkat.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten

Dharmasraya sebagian besar adalah bertani, kemudian disusul sektor jasa (perdagangan, perhotelan, restoran), industri pengolahan, jasa servis dan lain lain.

Dari jumlah penduduk, 70,17 persen di antaranya merupakan angkatan kerja produktif. Dari jumlah angkatan kerja produktif, hanya 5,08 persen yang tidak bekerja alias menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja hanya 29,83% dari Total penduduk usia bekerja, dan sebagian besar melaksanakan Mengurus rumah tangga

175.081 Jiwa
Penduduk Usia Kerja



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat Agustus 2019

Perekonomian Daerah

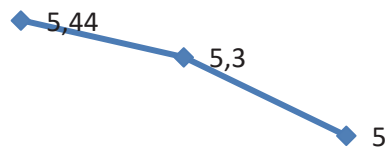
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dharmasraya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Ini sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar dalam PDRB, disusul sektor jasa dan sektor perdagangan.

Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Berdasarkan PDRB per Kapita, Laju ekonomi di Kabupaten Dharmasraya mengalami Penurunan dalam kurun 3 tahun terakhir. Hal ini perlu menjadi perhatian Lebih bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dharmasraya.

Jika kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat Dari angka kemiskinan. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan. Dibanding rata rata tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, angka kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya lebih rendah. Ini menunjukkan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumberdaya alam sudah semakin baik serta situasi dan kondisi untuk mengembangkan usaha juga semakin kondusif.

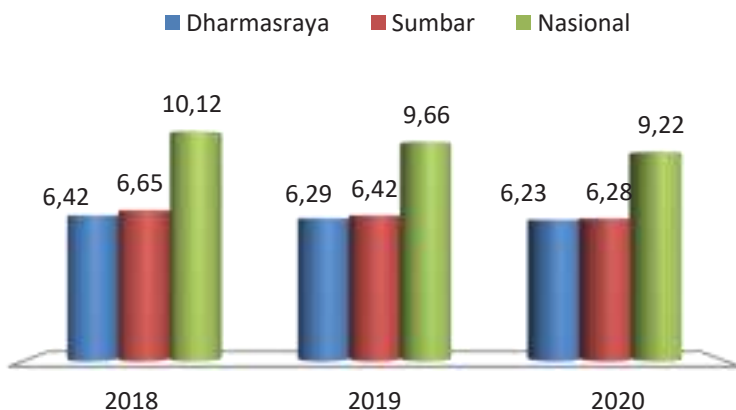
Bahkan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Nasional, angka kemiskinan Kabupaten Dharmasraya Sudah melampaui angka kemiskinan Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Dharmasraya Tahun 2017-2019



2017 2018 2019
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat,

Angka Kemiskinan Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2020



Kabupaten Dharmasraya secara sosial budaya terdapat sejumlah etnis, seperti Jawa, Sunda, Batak, dan tentu saja Minangkabau yang paling dominan. Dengan multi etnis tersebut, Pemkab Dharmasraya berupaya membangun identitas ke-Dharmasraya-an yang berakar dari etnis yang ada. Akulturasi dan amalgamasi dibangun secara alamiah dengan membaurkan etnis-etnis yang ada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan dan juga dengan mendorong pelaksanaan berbagai event budaya, sehingga trend kebudayaan baru hasil akulturasi dan amalgamasi ini akan menjadi identitas baru yakni Dharmasraya.

Salah satu upaya Pemkab Dharmasraya untuk membangun identitas kabupaten adalah dengan pelaksanaan Festival Pamalayu. Kegiatan tersebut mengangkat sebuah peristiwa ekspedisi pada abad ke-XIII masehi, dimana Raja Kertanegara dari Singhasari mengutus delegasi ke Kerajaan Swarnabhumi dengan mengirimkan sebuah arca perdamaian yang dikenal dengan arca Amoghapasa. Ekspedisi ini dikenal sebagai sebuah ekspedisi damai dan kelak hasilnya menjadi bagian dari upaya menyatukan nusantara.

Dalam prasasti yang dipahatkan di alas arca Amoghapasa, terungkap bahwa di Kabupaten Dharmasraya pernah ada sebuah pusat kerajaan bernama kerajaan Swarnabhumi, yang merupakan kerajaan melayu kuno.

Saat ini banyak peninggalan sejarah masa silam yang patut untuk digali dan diterjemahkan, nilai luhur apa yang terkandung di dalamnya. Inilah yang akan menjadi identitas Dharmasraya, sebagai salah satu daerah yang pernah memiliki peran besar dalam membangun nusantara di masa lalu.



C. Riwayat Kabupaten Dharmasraya



Sebelum dimekarkan, Kabupaten Dharmasraya merupakan bahagian dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Pada saat itu ada 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sitiung dan Kecamatan Sungai Rumbai. Program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah pusat pada tahun 1977, berhasil dengan baik. Keberhasilan program transmigrasi tersebut membawa dampak terhadap pembauran antara masyarakat transmigran dengan masyarakat setempat, peningkatan perekonomian masyarakat dan mendorong perkembangan wilayah.

Perkembangan wilayah dan juga masyarakat menjadikan adanya tuntutan pelayanan yang memadai. Tuntutan ini kemudian dijawab dengan dimekarkannya Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, maka Pemerintah resmi membentuk Kabupaten Dharmasraya,. Pada tanggal 7 Januari 2004, Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan kabupaten Pemekaran di Istana Negara, termasuk Kabupaten Dharmasraya

Aktifitas pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara riil baru dilakukan setelah dilantiknya Pejabat Bupati pertama pada tanggal 10 Januari 2004. Saat itu, penjabat Bupati pertama Drs, H. Ahmad Munawar, MM memulai pemerintahan dengan merekrut sejumlah personil dan juga menyiapkan perkantoran, terutama kantor bupati. Untuk pertama kali personil direkrut dari kabupaten induk yang bersedia pindah ke Dharmasraya dan para pegawai yang bertugas di kabupaten baru.

Berdasarkan panduan dari Kementerian Dalam Negeri, Penjabat Bupati Ahmad Munawar memberlakukan SOTK khusus kabupaten pemekaran dengan mengisi SOTK dengan personil yang ada. Mandat yang diberikan oleh penjabat bupati, selain menyiapkan struktur organisasi pemerintahan, juga membentuk DPRD dan menyiapkan pemilihan kepala daerah. Pembentukan DPRD dilakukan dengan melaksanakan konversi suara dari daerah pemilihan (Dapil) wilayah Kabupaten sesuai dengan tatacara konversi suara menjadi kursi dan jumlah anggota DPRD. Pada saat itu, jumlah anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya 25 orang.

Penjabat Bupati H. Ahmad Munawar tidak bisa melanjutkan tugasnya. Yang bersangkutan wafat tiga bulan setelah dilantik dan digantikan oleh Drs. Asrul Syukur yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung. Asrul merupakan pamong senior yang telah malang melintang bertugas di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, termasuk yang kemudian menjadi Kabupaten Dharmasraya.



Bupati I Kabupaten Dharmasraya
Bpk. H. Marlon Martua Situmeang, S.E



Bupati 2 Kabupaten Dharmasraya
Bpk. Ir. H. Adi Gunawan, M.M



Bupati 3 Kabupaten Dharmasraya
Bpk. Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E

Di tangan Asrul Syukur pemilihan bupati disiapkan. Namun kemudian dieksekusi oleh Drs. Bakri. Asrul Syukur sendiri kemudian ikut berkompetisi dalam pemilihan bupati Dharmasraya, sehingga harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Penjabat Bupati Dharmasraya dan digantikan oleh Drs. Bakri yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya. Bakri dengan gemilang mengantarkan Kabupaten Dharmasraya memilih bupati definitif pertama.

Pada tahun 2005, terpilih Bupati Dharmasraya devinitif pertama periode 2005-2010, yaitu H. Marlon Martua, SE sebagai Bupati dan Ir. Tugimin sebagai Wakil Bupati. Pasangan itu membawa visi “Mewujudkan Kabupaten Dharmasraya yang Maju Dalam Keseimbangan”.

Kemudian pada periode 2010-2015 bupati dan wakil bupati Dharmasraya dijabat oleh Ir. H. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin. R. pasangan itu membawa visi “Terwujudnya masyarakat Dharmasraya yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, adil dan sejahtera pada tahun 2015”.

Selanjutnya Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE dan Wakil Bupati H. Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos. Kedua pemimpin muda ini membawa visi “Menuju Kabupaten Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”

Dalam usia kabupaten yang sudah mencapai 17 tahun, Kabupaten Dharmasraya lepas dari daerah terpencil, perekonomiannya terus meningkat, pemerintahannya semakin mantap dan juga telah meraih prestasi di berbagai even, baik regional maupun nasional.



D. PERMASALAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dharmasraya masih di bawah angka Provinsi dan Nasional
2. PDRB perkapita masih di bawah angka nasional
3. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih dibawah Provinsi dan Nasional
4. Jalan dalam Kondisi mantap belum memadai
5. Belum seluruh masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi dan air minum yang layak
6. Masih adanya rumah tidak layak huni
7. Masih adanya pemukiman kumuh
8. Tingginya tingkat pencemaran air di Kabupaten Dharmasraya terutama sepanjang aliran sungai batang hari
9. Penurunan kualitas (degradasi) lahan sehingga meningkatnya lahan kritis
10. Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Dharmasraya masih di atas angka Provinsi Sumatera Barat
11. Banyaknya koperasi tidak aktif yang merupakan koperasi dari saat Kabupaten Dharmasraya belum dimekarkan

E.SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I – PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

menjelaskan capaian kinerja organisasi, perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah serta realisasi anggaran tahun yang bersangkutan.

BAB IV – PENUTUP

menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021, maka tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah di tahun keempat. Ini berarti, kondisi lingkungan strategis yang digunakan dalam perencanaan kinerja adalah gambaran dari separoh perjalanan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

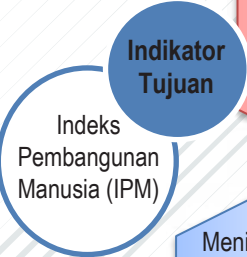
Adapun visi yang ingin dicapai dalam lima tahun periode RPJMD adalah **“Menuju Dharmasraya yang Mandiri dan Berbudaya”**. Dalam visi tersebut ada dua kata kunci, yaitu Mandiri dan Berbudaya. Mandiri dapat digambarkan bahwa ekonomi daerah yang memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi ekonomi eksternal, dengan mendorong keragaman prodyksi daerah, ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi keluarga serta meningkatkan nilai tambah produk komoditi daerah.

Selain itu mandiri juga dapat digambarkan sebagai makin besarnya peranan masyarakat dalam pengelolaan hasil pertanian, jaringan distribusi dan pemasaran. Dan juga berkurangnya arus modal dan pelayanan penduduk keluar daerah, karena semakin tersedianya berbagai sarana ekonomi dan sosial di daerah sendiri bagi kebutuhan masyarakat dan lebih lanjut diharapkan mampu melayani daerah sekitarnya.

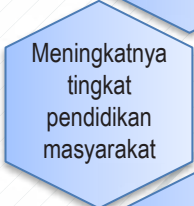
Berbudaya dapat digambarkan semakin cerdas, terdidik dan terampilnya anak negeri dan kuatnya identitas budaya Dharmasraya yang multikultural, yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan berdasarkan iman dan taqwa.

Dari Visi Menuju Dharmasraya yang mandiri dan berbudaya, lahirlah 7 misi untuk mencapai visi tersebut, dari 7 misi dijabarkan kembali menjadi 8 tujuan dengan 15 sasaran, dari ke 15 sasaran tersebut, didapatkan 25 indikator sasaran yang akan dijabarkan didalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran ini telah tercantum dalam dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021, dan merupakan acuan bagi seluruh perangkat daerah untuk menghasilkan kinerja yang berorientasi hasil dengan efektif dan efisien



Indikator Sasaran
Angka Harapan Hidup



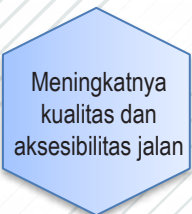
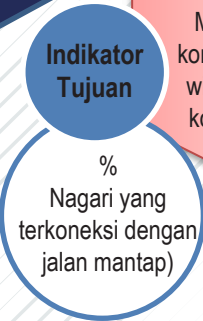
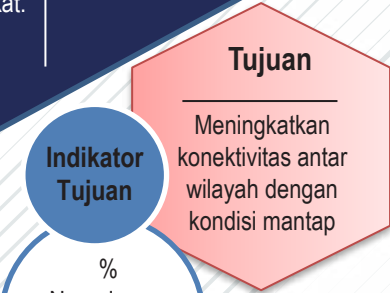
Indikator Sasaran
- Angka rata-rata lama sekolah
- Harapan lama sekolah



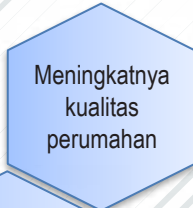
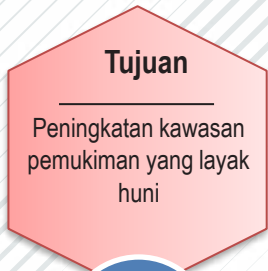
Indikator Sasaran
Indeks Ketahanan Pangan



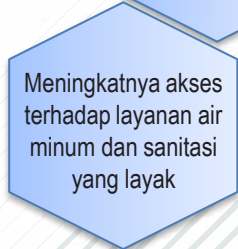
Indikator Sasaran
- Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)



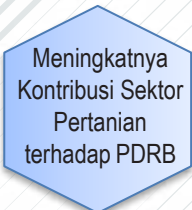
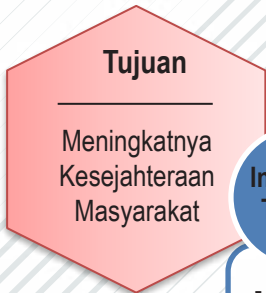
Indikator Sasaran
Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap



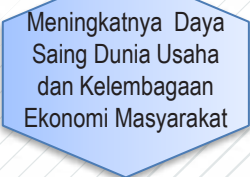
Indikator Sasaran
Rasio Rumah Layak Huni



Indikator Sasaran
- Akses Air Minum Layak
- Akses Sanitasi yang layak



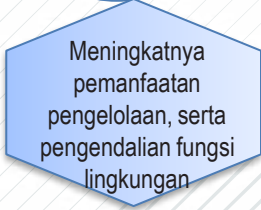
Indikator Sasaran
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB



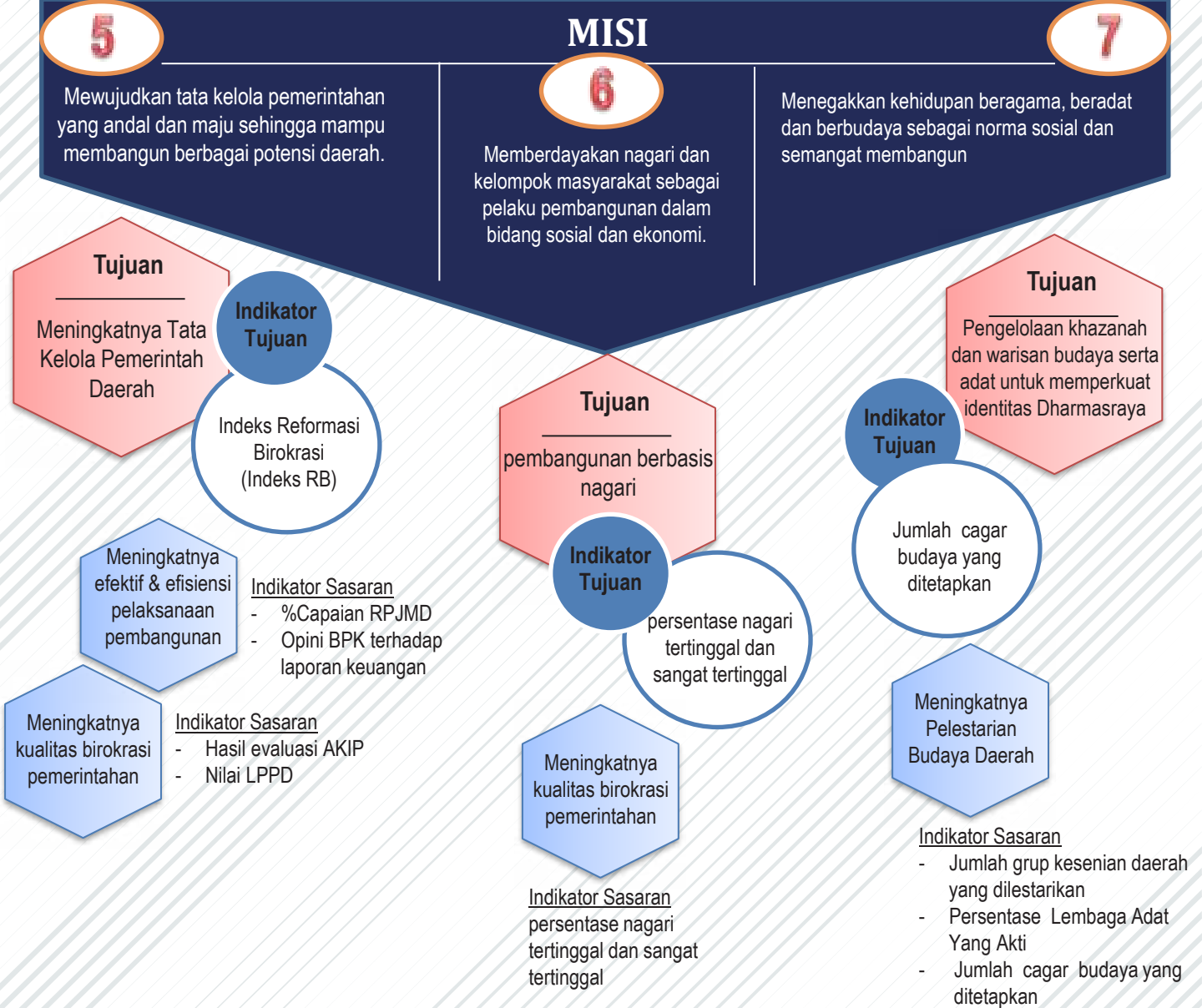
Indikator Sasaran
- Jumlah Koperasi Sehat
- Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas
- % IKM dg peningkatan Omset
- % Pasar dalam kondisi baik



Indikator Sasaran
Persentase Penduduk Miskin



Indikator Sasaran
- Indeks Kualitas lingkungan hidup



Untuk memudahkan pemahaman, maka penyajian sasaran pembangunan tersebut dikelompokkan dalam empat bidang, yaitu :

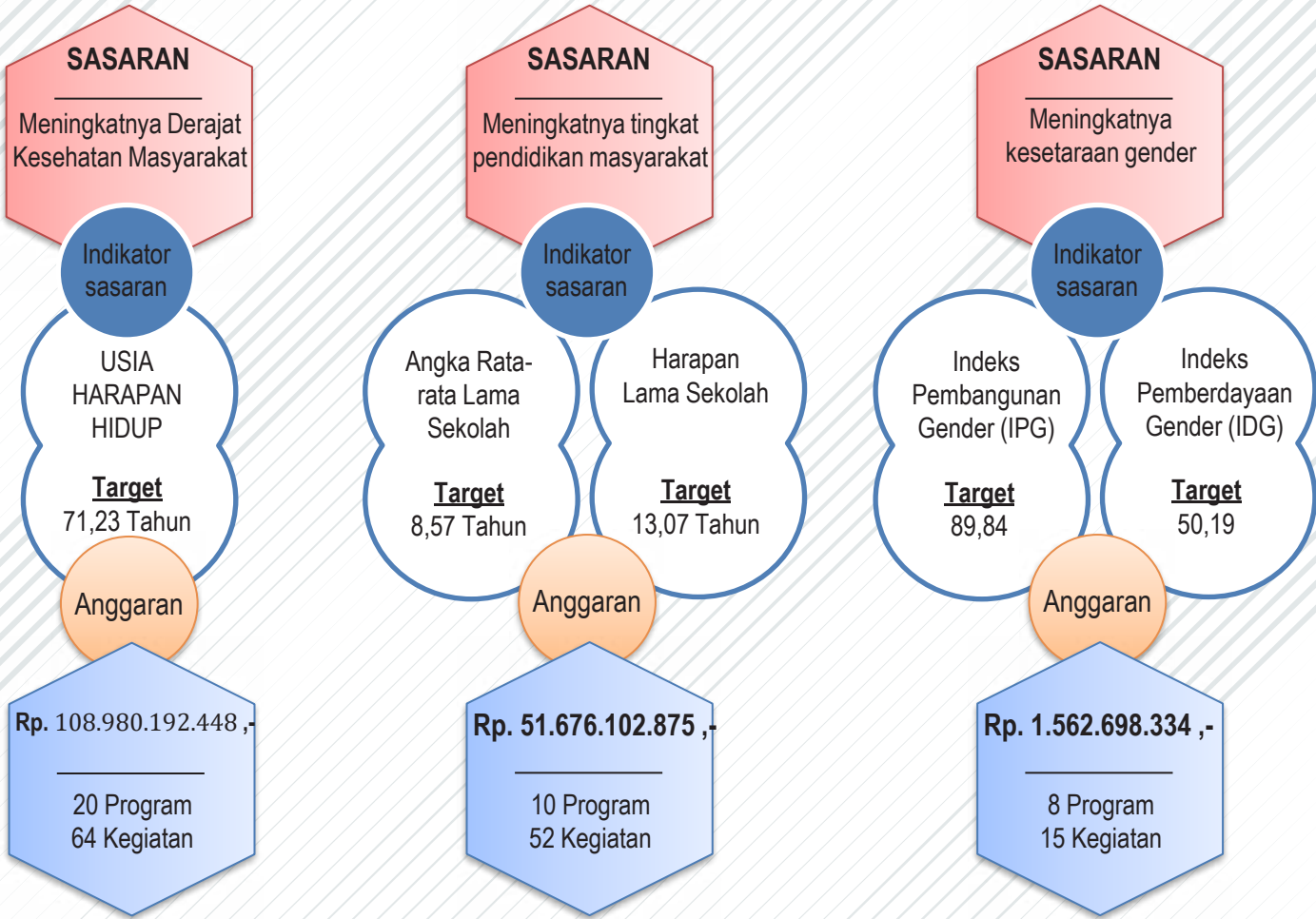
- 1. Bidang Sumberdaya Manusia,**
Sasaran yang mengacu kepada kepentingan sumber daya manusia, atau secara langsung menyangkut kepada masyarakat, seperti bidang pendidikan, kesehatan maupun kesetaraan gender.
- 2. Bidang Ekonomi,**
seluruh sasaran yang berkaitan dengan tingkat perekonomian masyarakat. Serta kualitas hidup masyarakat dalam menjalani kehidupannya
- 3. Bidang Sosial Budaya**
bidang ini berfokus kepada pemerintahan pembangunan nagari, serta kebudayaan
- 4. Bidang Lingkungan Hidup.**
Bidang ini membahas sasaran tentang kualitas lingkungan hidup di Kabupaten dharmasraya



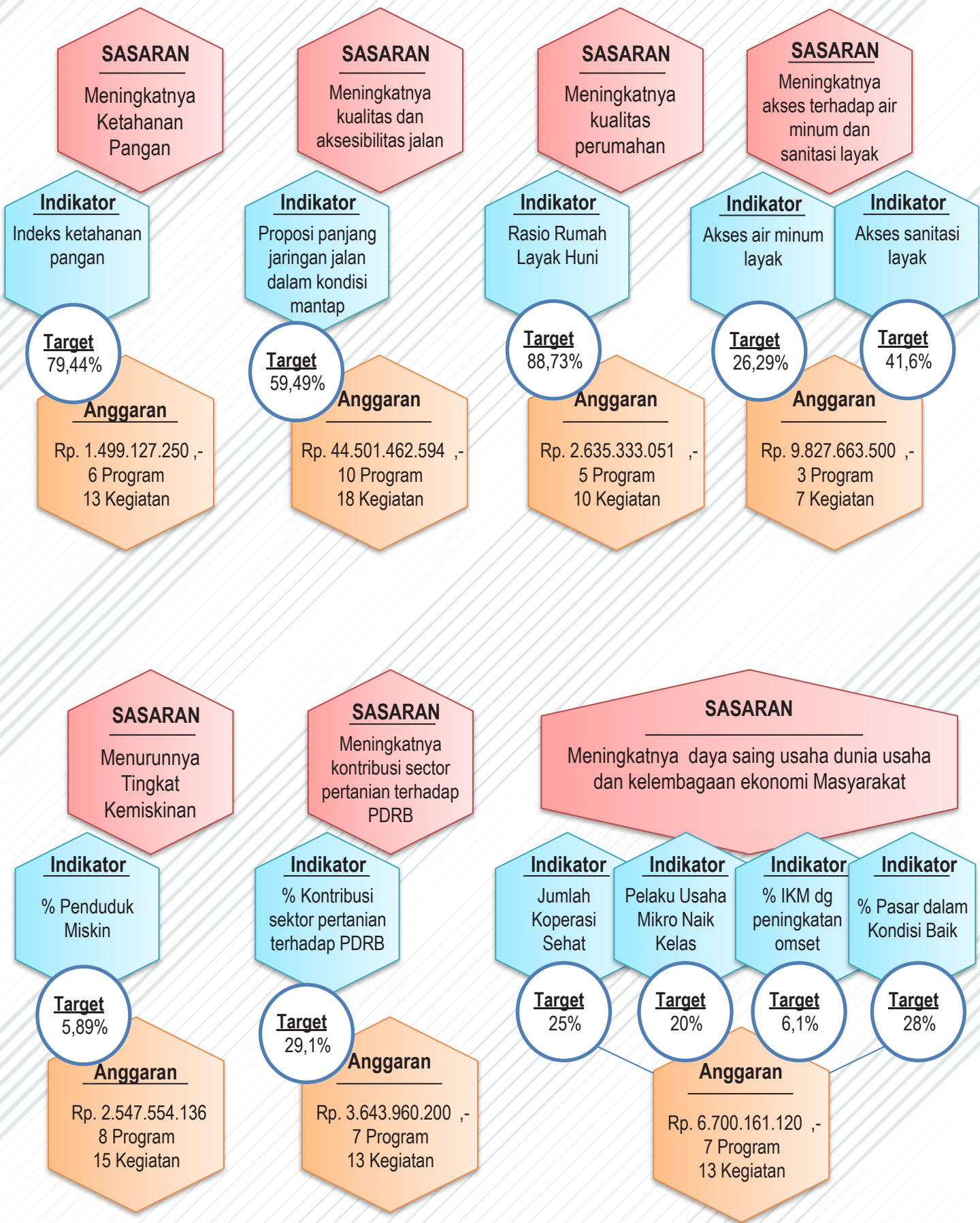
B. Perjanjian Kinerja dan Penganggaran

sebelum memulai tahun anggaran, kepala daerah membuat komitmen tentang apa yang akan dilakukan untuk mengisi pembangunan di tahun berikutnya. Komitmen tersebut dituangkan dalam perjanjian kinerja kepala daerah sebagai pedoman semua perangkat daerah dalam penyusunan kinerja tahun berikutnya. Adapun perjanjian kinerja Bupati Dharmasraya tahun 2020 adalah sebagai berikut :

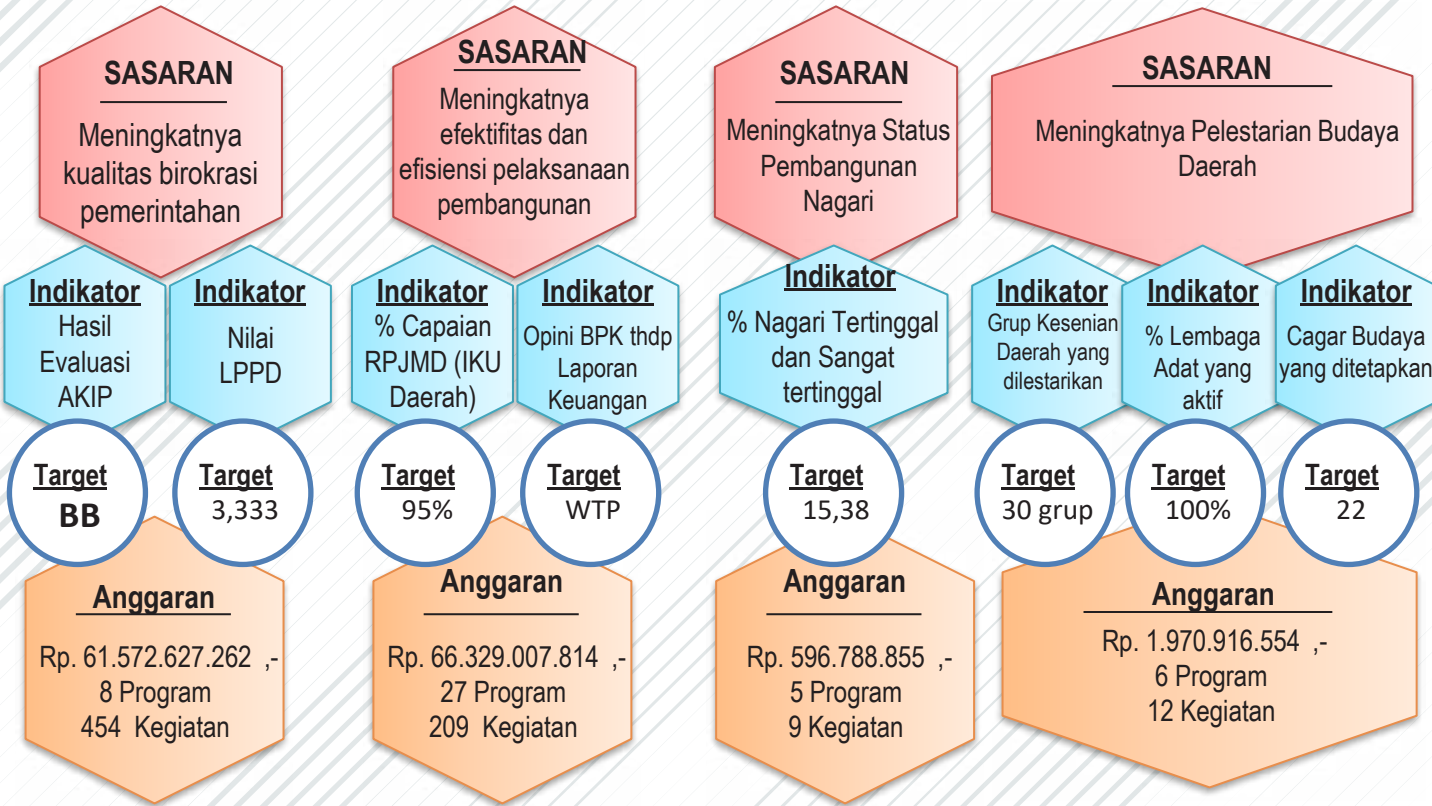
PERJANJIAN KINERJA BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA TAHUN 2020



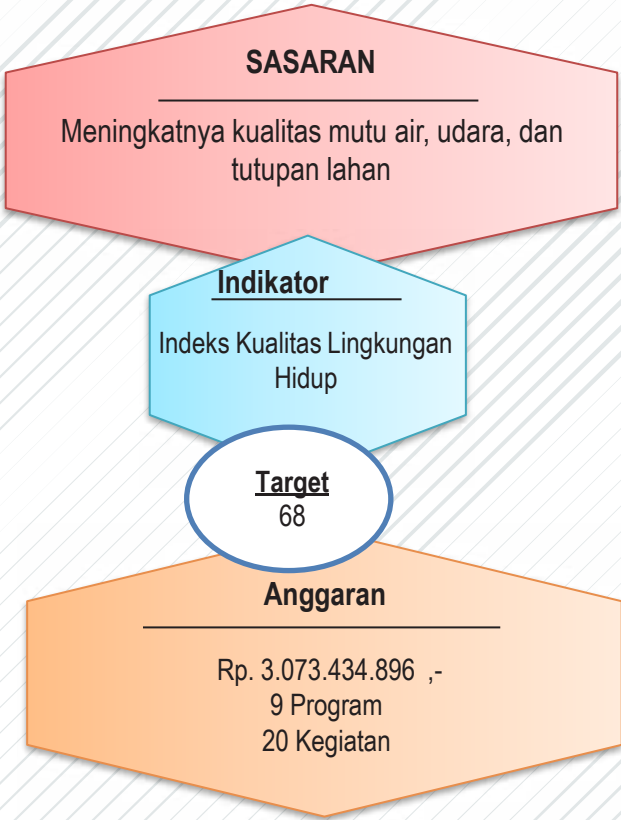
PERJANJIAN KINERJA BIDANG EKONOMI TAHUN 2020



PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG SOSIAL BUDAYA TAHUN 2020



PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan 15 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja yang menggambarkan sejauh mana keberhasilan capaian kinerja pemerintah daerah.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

No	Nilai Kinerja	Prediket Kinerja
1	> 85	Sangat Berhasil
2	$70 < X \leq 85$	Berhasil
3	$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
4	< 55	Tidak Berhasil

Dalam rangka penyampaian laporan yang komunikatif, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengelompokkan sasaran tersebut menjadi 4 Bidang yaitu; Bidang Sumber Daya Manusia, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial dan Budaya, dan Bidang Lingkungan Hidup. Adapun capaian kinerja tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut;

1. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA



Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa bidang Sumber Daya Manusia ditetapkan 3 sasaran dengan 5 indikator, dari 3 Sasaran yang menjadi fokus bidang Sumber Daya Manusia, seluruhnya mencapai prediket sangat berhasil dengan nilai mean 92,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Dharmasraya,.

A. SASARAN MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

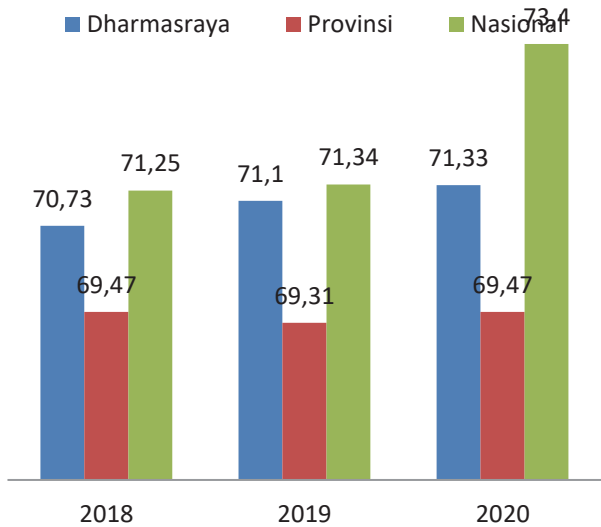
INDIKATOR USIA HARAPAN HIDUP



Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur dengan indikator angka harapan hidup atau usia harapan hidup. Target yang ditetapkan tahun 2020 adalah 71,23 tahun bisa dicapai 71,33 tahun. Ini berarti capaian sebesar 100,14 persen dari target yang ditetapkan. Capaian nilai mean **92,5** dengan katagori **sangat berhasil**.

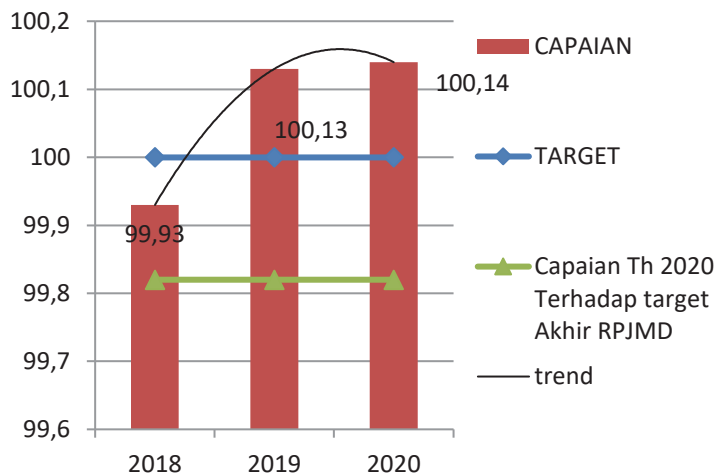
Dibandingkan dengan keadaan Provinsi capaian Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan usia harapan hidup masyarakat melampaui rata rata usia harapan hidup provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yaitu sebesar 69,47 tahun. Jika dibandingkan dengan usia harapan hidup nasional, capaian Kabupaten Dharmasraya masih dibawah capaian nasional dimana angka harapan hidup secara nasional adalah 73,4 tahun

Perbandingan Capaian Angka Harapan Hidup Dharmasraya, Provinsi dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Dharmasraya; 2021

Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2018-2020



Jika dilihat dari capaian berdasarkan target yang ditetapkan, capaian Kinerja Kabupaten Dharmasraya dalam meningkatkan usia harapan hidup masyarakat mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika dibandingkan capaian tahun 2020 dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021, Capaian usia harapan Hidup sudah terealisasi sebesar 99,82%.

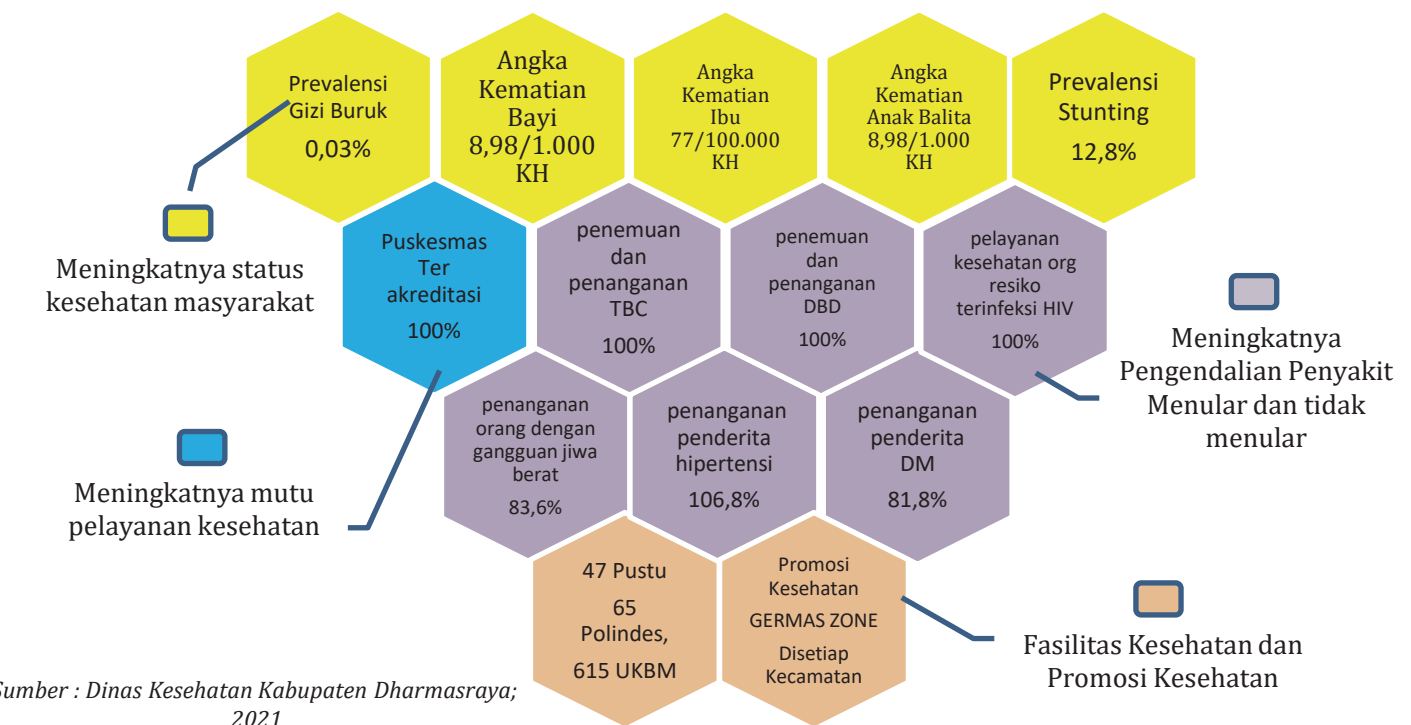


Sumber: BPS Dharmasraya; 2021

Capaian tersebut terealisasi berkat ada upaya Pemerintah untuk mendorong pelaksanaan pola hidup sehat secara masif. Pemasyarakatan pola hidup sehat ini dilakukan melalui kegiatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

Setiap bulan Germas dilaksanakan di kecamatan secara bergiliran agar bisa menjangkau masyarakat di seluruh kabupaten. Selain melalui Germas, Pemkab Dharmasraya juga mengintensifkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan rumah sakit. Peningkatan layanan kesehatan ini dilakukan dengan cara melengkapi peralatan kesehatan yang lebih moderen, peningkatan biaya operasional layanan kesehatan, peningkatan keterampilan dan pengetahuan petugas kesehatan, petugas medis dan paramedis. Bahkan untuk mencapai standar layanan kesehatan yang baik, semua unit layanan kesehatan sudah distandardisasi.

Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat



Keberhasilan pencapaian meningkatnya usia harapan hidup di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 20 Program dan 64 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.893.288.831



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. Untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020, anggaran yang dialokasikan untuk sasaran ini sebesar Rp.1.027.490.329, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp.1.102.340,366, artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp.74.849.975 per 1% capaian.

B. SASARAN MENINGKATNYA TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

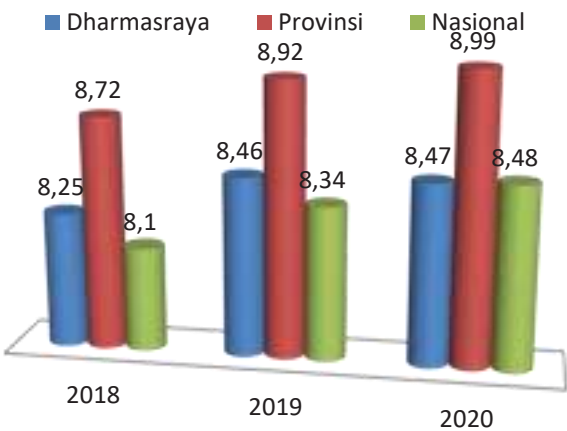


Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat diukur dengan dua indikator, yaitu angka rata rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Untuk indikator angkat rata-rata sekolah ditarget 8,57 tahun. Berhasil direalisasikan 8,47 persen, dengan capaian 98,83. Untuk indikator harapan lama sekolah ditetapkan 13,07 tahun terealisasi 12,43 tahun dengan capaian 95,1 persen. Dengan mean dalam sasaran ini sebesar **92,5** maka capaian dari sasaran di atas dikatagorikan **sangat berhasil**.

INDIKATOR ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

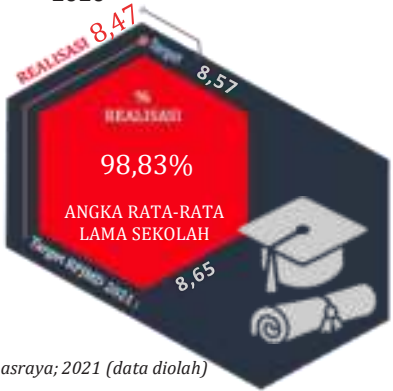
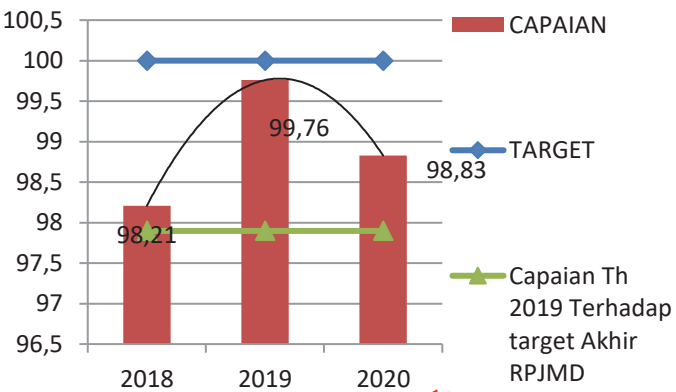
Angka rata rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 ditargetkan 8,57 tahun. Berhasil direalisasikan 8,47 tahun, dengan capaian 98,83% dengan kategori sangat berhasil, bahkan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021, capaian angka lama sekolah sudah mencapai 97,92% dari target akhir RPJMD. Jika dilihat dari pencapaian selama 3 tahun terakhir, pencapaian kinerja angka rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan ditahun 2020.

Perbandingan Capaian Angka Lama Sekolah Dharmasraya, Provinsi dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Dharmasraya; 2021

Capaian Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2020

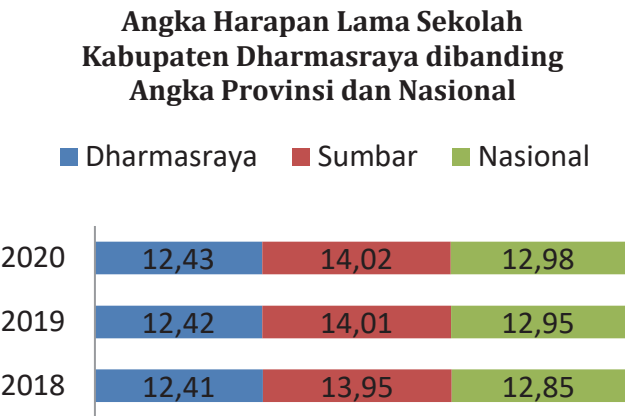
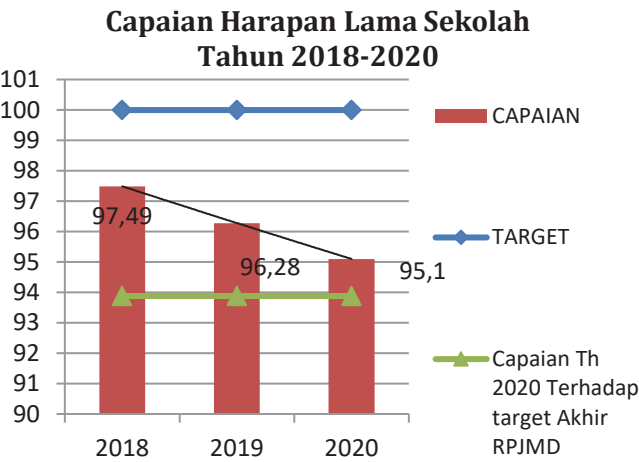


Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 masih berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat, namun angka lama sekolah ini sudah hampir melampaui pencapaian nasional yaitu sebesar 8,48 tahun.

Sumber: BPS Dharmasraya; 2021 (data diolah)

INDIKATOR HARAPAN LAMA SEKOLAH

Penghitungan Angka harapan lama sekolah bertujuan untuk mengetahui harapan anak anak usia tertentu untuk bersekolah. Indikator tersebut menggambarkan mengenai kualitas lembaga pendidikan yang dikaitkan dengan kemungkinan anak anak usia tertentu dapat menempuh pendidikan di lembaga pendidikan. Dengan demikian, kualitas lembaga pendidikan di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat dari seberapa lama anak usia sekolah bisa mengenyam pendidikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Dharmasraya; 2020

Besarnya capaian sasaran Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ini tidak lepas dari adanya upaya Pemkab Dharmasraya dalam peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Dalam setahun terakhir ini, Pemkab Dharmasraya melakukan upaya peningkatan manajemen Sekolah, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain dengan mengupayakan pembangunan sekolah baru, melaksanakan pembinaan terhadap profesionalisme guru, menyelenggarakan sekolah percontohan, melengkapi fasilitas sekolah dengan laboratorium, penambahan bahan bacaan perpustakaan sekolah dan bahkan usaha kesehatan sekolah.

Selain itu, Pemkab Dharmasraya melaksanakan sosialisasi masif untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat dan para orang tua, agar dapat mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar dan juga pendidikan usia dini (PAUD). Pemkab Dharmasraya terus mendorong penduduk usia sekolah untuk bersekolah, termasuk melalui pendidikan kejar paket A dan paket B. Bahkan serta menyekolahkan anak anak dari suku anak dalam.

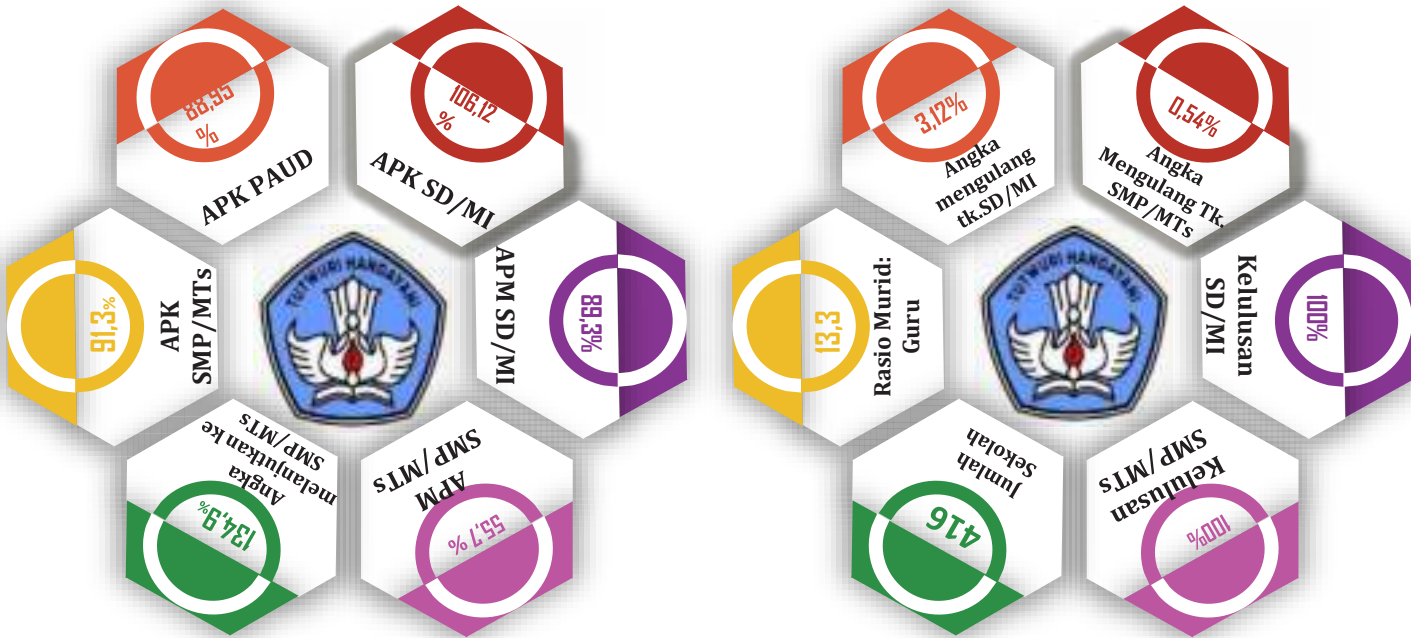
Berdasarkan hal tersebut di atas, angka harapan lama sekolah yang berhasil dicapai Kabupaten Dharmasraya adalah 12,43 tahun dari target 13,07 tahun. Ini berarti capaian angka harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya sangat berhasil (95,1%). Jika dibandingkan dengan capaian 3 tahun terakhir, kinerja capaian harapan lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan setiap tahunnya, namun mengalami peningkatan poin setiap tahunnya.

Dibanding angka harapan lama sekolah tingkat provinsi dan Nasional, capaian Dharmasraya masih berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Bahkan jika dibanding dengan angka nasional, angka harapan lama sekolah Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah yaitu sebesar 12,98. Ini perlu upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.





Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya; 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 10 Program dan 52 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.641.504.141



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya tingkat Pendidikan masyarakat dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. Untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.511.935.838, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp.847.650.082, artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp.335.714.244 per 1% capaian.

C. Sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Terpenuhinya Hak Anak

sasaran ini diukur dengan dua indikator, yaitu indek pembangunan gender (IPG) dan indek pemberdayaan gender (IDG). Untuk IPG ditargetkan 89,84 terealisasi 88,30 atau dengan capaian 98,29%. Target IDG ditetapkan sebesar 50,19 terealisasi 50 atau tercapai sebesar 99,6 persen. Dengan angka tersebut diperoleh **mean 92,5** atau masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

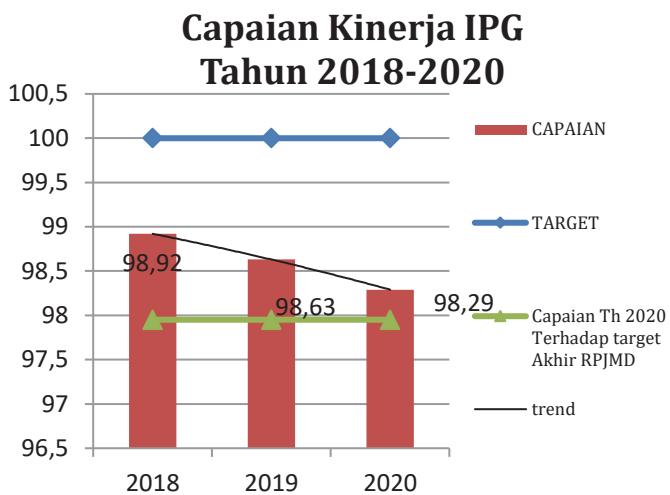


INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

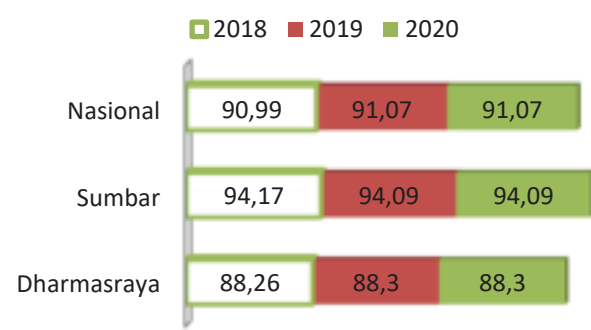
Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, serta meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

Capaian IPG Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 adalah 88,3. angka tersebut merupakan 98,29 persen dari target yang ditetapkan. Berarti upaya Pemkab Dharmasraya dalam membangun peranan kaum perempuan dan laki laki dalam menjalankan kehidupan di tengah masyarakat boleh dikatakan sangat berhasil. Namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir, capaian kinerja IPG dibandingkan target yang ditetapkan mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara usia harapan hidup perempuan dengan laki-laki, angka partisipasi sekolah perempuan dan lelaki serta kesenjangan indeks distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki di kehidupan masyarakat Kabupaten Dhasmasraya

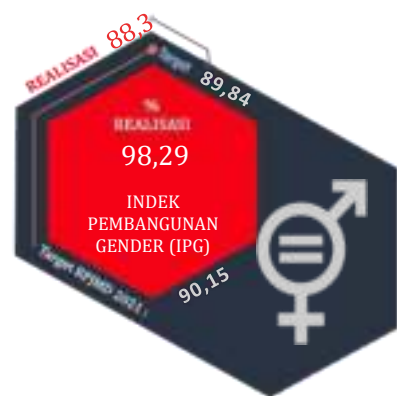
Capaian IPG dalam tiga tahun terakhir yang cenderung naik. Pada tahun 2018 IPG Kabupaten Dharmasraya 88,26 menjadi 88,3. meskipun mengalami kenaikan, namun IPG Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah IPG Provinsi Sumatera barat tahun 2020 sebesar dan juga IPG nasional yang mencapai 91,07. kondisi ini mewajibkan Pemkab Dharmasraya untuk terus berinovasi agar IPG di masa datang bisa mengikuti angka provinsi dan nasional.



Capaian IPG Kabupaten Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional



Sumber: Dinas Sosial Kab. Dharmasraya; 2021



Sumber: Dinas Sosial Dharmasraya; 2021

INDIKATOR INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)



IDG berfungsi untuk mengukur kesetaraan Wanita dan pria dalam partisipasi politik dan pemberdayaan gender dalam bidang ekonomi. Capaian nilai IDG di Kabupaten Dharmasraya mengalami penurunan pada tahun 2020, pencapaian tahun 2019 merupakan capaian kinerja tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun.

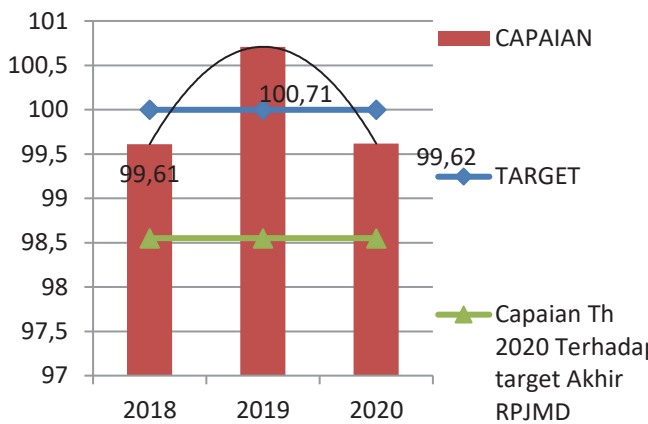
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebesar 50 dengan capaian 99,62% dari target yang ditetapkan dengan kategori sangat berhasil.

Meskipun capaian IDG Kabupaten dinilai sangat berhasil, namun jika dibandingkan dengan angka IDG Provinsi Sumbar tahun 2020 sebesar 65,7 dan nasional 72,1 maka capaian IDG Kabupaten Dharmasraya masih sangat jauh tertinggal.

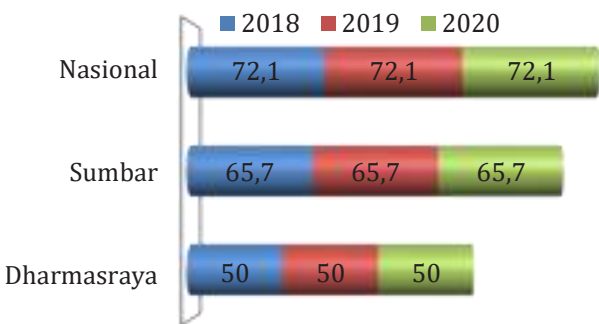
ketertinggalan Kabupaten Dharmasraya di bandingkan Provinsi dengan nasional salah satunya disebabkan oleh rendahnya keterlibatan perempuan didalam parlemen, dari 30 orang anggota parlemen di Kabupaten Dharmasraya, hanya 2 (dua) atau 6% anggota perempuan, hal ini sangat jauh dari standar minimal sebesar 30% kuota perempuan di parlemen

Oleh karena itu diperlukan kerja keras, inovasi dan anggaran yang memadai untuk memberdayakan wanita di Kabupaten Dharmasraya agar berani aktif serta berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi maupun bidang politik, sehingga dapat meningkatkan IDG Kabupaten Dharmasraya di masa mendatang.

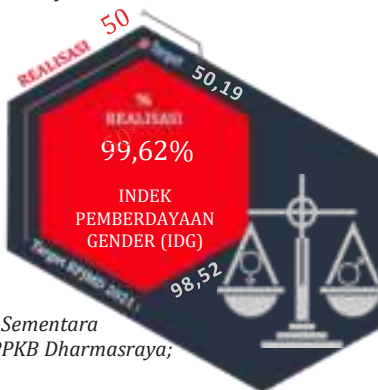
Capaian Kinerja IDG Tahun 2018-2020



Capaian IDG Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional



Sumber: Dinsos P3APPKB Dharmasraya; 2021



Keterangan) *Angka Sementara
Sumber: Dinsos P3APPKB Dharmasraya;
2021(data diolah)

Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian
Sasaran Meningkatkan Kesetaraan Gender



Keberhasilan meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak didukung oleh beberapa program antara lain. Program keluarga berencana (KB) belakangan juga diarahkan agar bagaimana penguatan peranan perempuan dan laki-laki dapat lebih proporsional dalam merencanakan, mengelola dan mengendalikan kehidupan keluarga. Program peningkatan pendidikan politik masyarakat. Program ini dinilai cukup berhasil dengan tampilnya kaum perempuan di lembaga wakil rakyat. Program peningkatan peran serta kepemudaan juga mendorong peningkatan sasaran ini. di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu, untuk mencapai kinerja sasaran ini pelaksanaan program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, seperti pemberdayaan organisasi wanita, PKK, dasawisma dan organisasi wanita lainnya juga dilaksanakan.



jika disimpulkan, dalam mencapai sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan menetapkan 8 Program dan 15 Kegiatan. Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya Kesetaraan Gender dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. Untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.15.211.523, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp.847.650.082, artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp.335.714.244 per 1% capaian.

2. BIDANG EKONOMI



Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa bidang EKONOMI ditetapkan 7 sasaran dengan 11 indikator, dari 7 Sasaran yang menjadi fokus Ekonomi, seluruhnya mencapai prediket sangat berhasil dengan nilai mean 92,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Ekonomi sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya

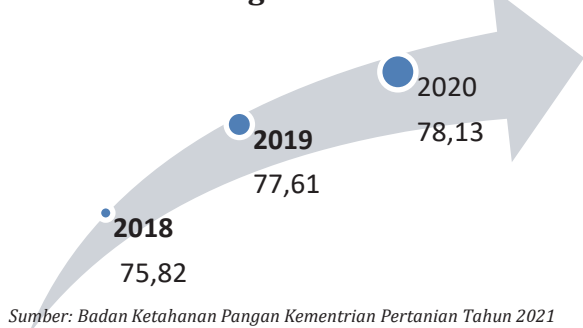


Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

INDEKS KETAHANAN PANGAN (IKP)

Ketahanan pangan menjadi pilar penting dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, ketahanan pangan harus dipermantap posisinya. Indikator keberhasilannya diukur dari indeks ketahanan pangan. Pada tahun 2020, Indeks ketahanan pangan Kabupaten Dharmasraya ditargetkan sebesar 79,44, target tersebut tercapai sebesar 78,13, dengan capaian 98,35% dan nilai mean 92,5 atau dengan kategori sangat berhasil

Indeks Ketahanan Pangan Dalam Tiga Tahun Terakhir

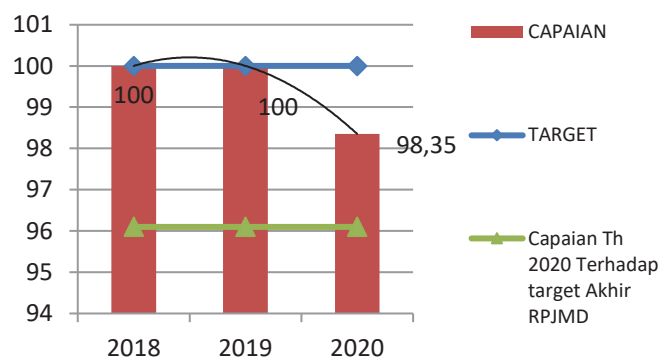


Jika ditilik ke belakang, trend indeks ketahanan pangan di Kabupaten Dharmasraya boleh dibilang dalam kondisi stabil. Bahkan capaiannya juga dalam katagori sangat berhasil. Pada tahun 2018, angka indeks ketahanan pangan mencapai 75,82. Kondisi tersebut naik menjadi 77,61 di tahun 2019.

Pada tahun 2020, ketahanan pangan Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan menjadi 78,13, namun dalam kategori ranking Nasional, IKP Dharmasraya mengalami penurunan dari ranking 175 menjadi ranking 178. penurunan ketahanan pangan di Dharmasraya di pengaruhi oleh kesiapan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Keberhasilan ini dikarenakan Pemkab Dharmasraya memang sangat komitmen untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat.

Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan

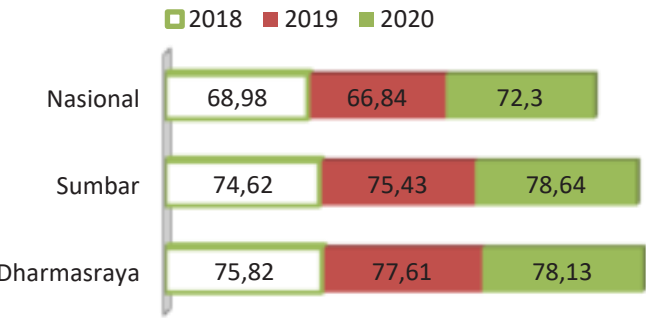


Berbagai program digelar dan pada umumnya berhasil, seperti intensifikasi pekarangan sebagai sumber bahan pangan keluarga. Selain itu, program penguatan lumbung pangan nigari juga dinilai cukup berhasil.

Ketahanan pangan ini ke depan harus terus menjadi perhatian Pemkab Dharmasraya. Sebab stabilitas ketersediaan pangan, Pemanfaatan pangan serta keterjangkauan pangan akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat.



Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian; 2021

Dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, capaian Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Dharmasraya tertinggi melebihi pencapaian Nasional namun belum melampaui capaian Provinsi, hal ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat menjamin masyarakatnya memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan keterjangkauan pangan terjamin.

Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Meningkatnya Ketahanan Pangan



Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 6 Program dan 13 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.499.127.250



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya Ketahanan Pangan dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.15.211.523, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 23.661.689, artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp.8.450.166 per 1% capaian.

Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Jalan

Indikator Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

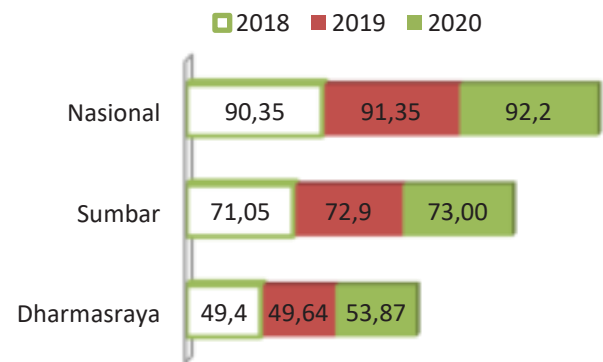
Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Jalan diukur dengan indikator Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap. Pada tahun 2020, proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap ditargetkan sebesar 59,49%. Target tersebut terealisasi 53,87% atau tercapai sebesar 90,55 persen. Dalam indikator tersebut diperoleh nilai mean **92,5** persen atau masuk katagori **sangat berhasil**.



Keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut didorong oleh terlaksananya program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan, perbaikan dan perawatan jalan kabupaten dan juga keberhasilan Pemkab Dharmasraya dalam mendorong agar nagari ikut melakukan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah masing masing. Dengan demikian, akses jalan dan proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Dharmasraya makin baik.

Jjika dibandingkan dari target yang ditetapkan, capaian kinerja proporsi jalan mantap menurun di tahun 2019 namun meningkat Kembali di tahun 2020, faktor utama penyebab penurunan ini adalah keterbatasan anggaran yang mampu dialokasikan Pemkab untuk pembangunan serta perbaikan jalan.

Capaian Proporsi Jalan Kondisi Mantap Kabupaten Dharmasraya dibanding angka Provinsi dan Nasional



proporsi Jalan dengan Kondisi mantap (>40km/Jam) di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sudah mencapai 50%, sedangkan jalan Provinsi dalam kondisi mantap ditahun yang sama telah mencapai 73% dan jalan Nasional dalam kondisi mantap sebesar 92,2%,



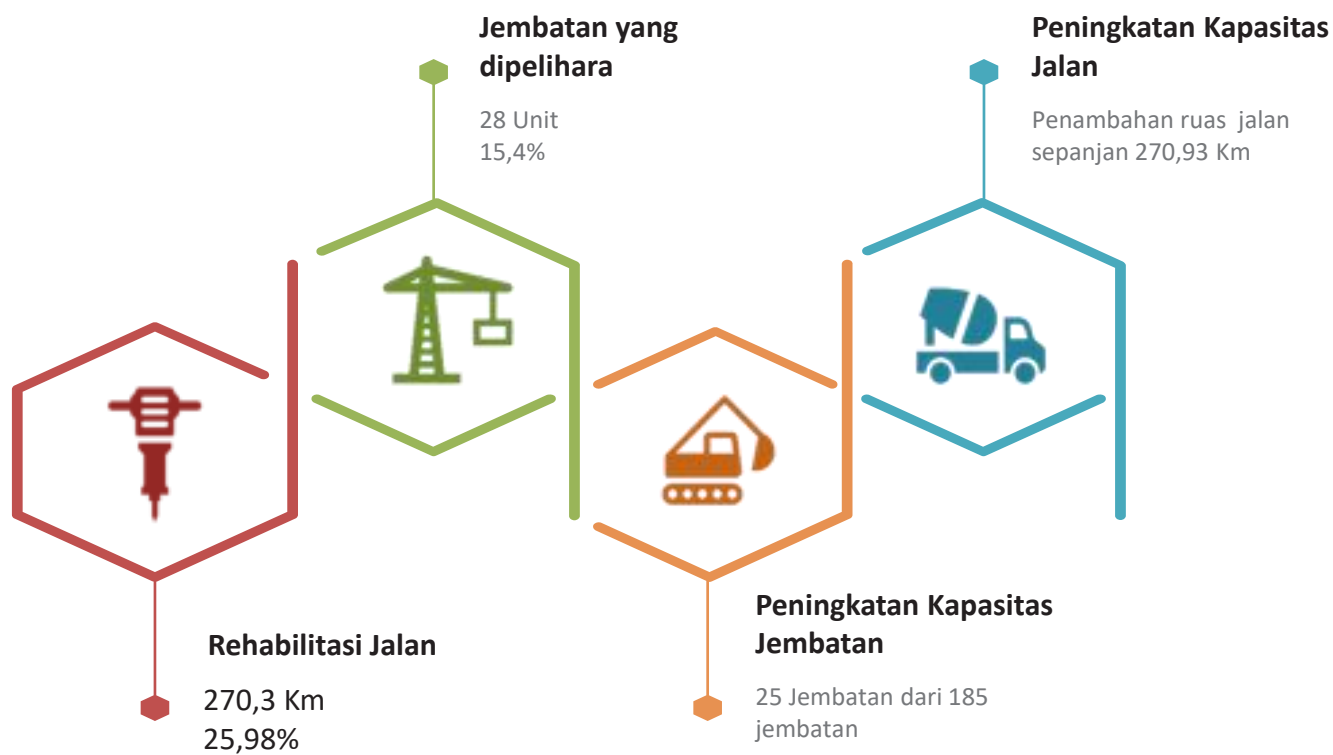
Sumber: Dinas PUPR Kab. Dharmasraya; 2021

hal ini tentu masih perlu perhatian besar dari pemerintah daerah untuk membenahi jalan dalam kondisi mantap (>40km/jam) di Kabupaten Dharmasraya.

Faktor yang mendukung pencapaian Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik (mantap)

- panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 adalah 517,67 km sedangkan pada Tahun 2020 panjang jalan dalam kondisi baik 552,58 Km dari Panjang seluruh Jalan Kabupaten 1042,85 KM, pada Tahun Anggaran 2020 penambahan panjang jalan terdiri dari :
 - a. Dari Dana DAK sepanjang 10,81 km
 - b. Dari Dana APBD sepanjang 11,88 km

Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Jalan



Sumber: Dinas PUPR Kab. Dharmasraya; 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 10 Program dan 18 Kegiatan dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 44.501.462.594



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan dinilai efisien dibandingkan tahun 2020. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.471.271.482, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 702.721.063, artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp.231.449.581 per 1% capaian.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan

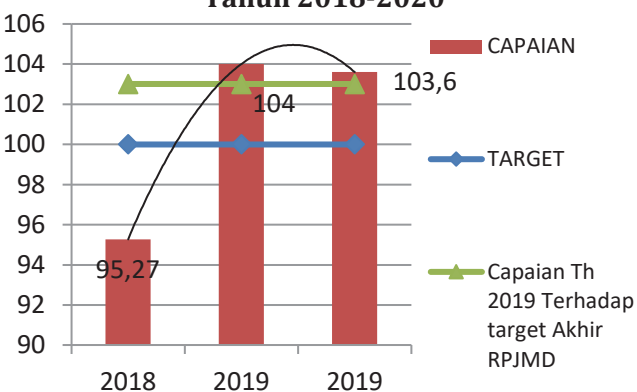


INDIKATOR RASIO RUMAH LAYAK HUNI

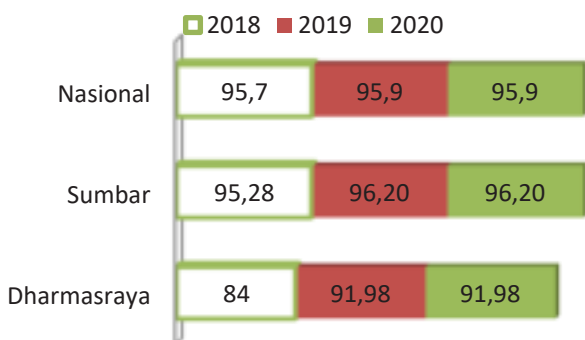
Pemerintahan yang baik adalah ketika Pemerintahan dapat menjamin ketersediaan kebutuhan primer masyarakatnya salah satunya adalah kebutuhan papan, hal ini yang mendasari kebutuhan papan menjadi bagian dari salah satu sasaran kinerja daerah yang harus dipenuhi.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan diukur dengan indikator rasio rumah layak huni. Pada tahun 2020, rasio rumah layak huni ditargetkan sebesar 88,45 persen. Target tersebut terealisasi 91,98 persen atau tercapai sebesar 103,99 persen. Dalam sasaran tersebut diperoleh nilai mean **92,5** persen atau masuk katagori **sangat berhasil**

Capaian Kinerja Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2018-2020



Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Dharmasraya dibanding Provinsi dan Nasional



Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Dharmasraya; 2021

Rasio rumah layak huni di Kabupaten Dharmasraya mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018, rasio rumah layak huni sebesar 84 % meningkat di tahun 2019 dan 2020 menjadi 91,98%. Namun dalam hal pencapaian, pencapaian tahun 2020 mengalami penurunan dari 104% menjadi 103,6%, hal ini dikarenakan Daerah lebih memfokuskan anggaran kepada penanggulangan dampak wabah *Covid-19*.

Walaupun capaian rasio rumah layak huni di Kabupaten Dharmasraya telah melebihi target yang ditetapkan, namun, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, Kabupaten Dharmasraya masih dibawah rasio rumah layak huni di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebesar 96,2 lebih tinggi dibanding rasio rumah layak huni secara nasional sebesar 95,9.



Besarnya capaian rasio rumah layak huni itu didukung oleh adanya pemberian bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni. Selain itu pemerintah juga mendorong masyarakat untuk secara mandiri membenahi rumahnya agar masuk dalam standar rumah layak huni. Melalui komunitas perumahan Pemkab Dharmasraya mengembangkan rumah layak huni. Penataan kawasan perumahan juga mendorong adanya kesadaran masyarakat untuk membangun dan merehabilitasi rumah mereka sehingga bisa menjadi rumah layak huni.



Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perumahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 5 Program dan 10 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.624.983.561,-



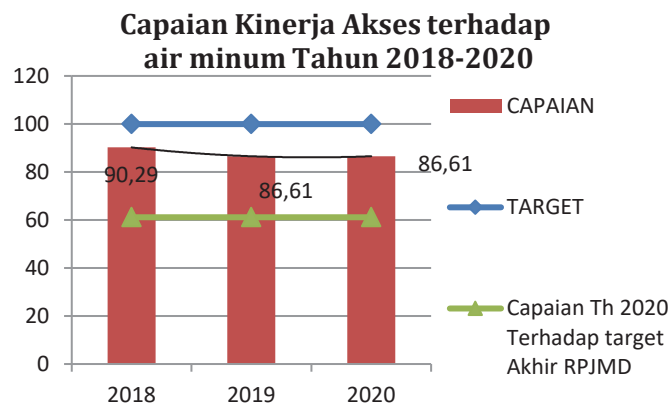
Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perumahan dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.25.322.330, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 112.697.474 artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp.87.375.144 per 1% capaian.



Meningkatnya Akses terhadap Air Minum dan Sanitasi yang Layak

Untuk mengetahui sejauh mana sasaran ini bisa dicapai, maka ditetapkan indikator persentase akses air minum yang layak dan persentase sanitasi yang layak.. Dari dua indikator diatas didapatkan nilai mean 92,5 atau masuk dalam kategori sangat berhasil

Indikator Akses terhadap air minum layak



Capaian indikator akses terhadap air minum yang layak mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2019, hal ini di karenakan tingginya target yang ditetapkan serta kurangnya realisasi anggaran untuk penambahan akses air minum yang layak kepada masyarakat, sehingga masih dibutuhkan prioritas dari pemerintah daerah untuk memenuhi akses masyarakat terhadap air minum yang layak.

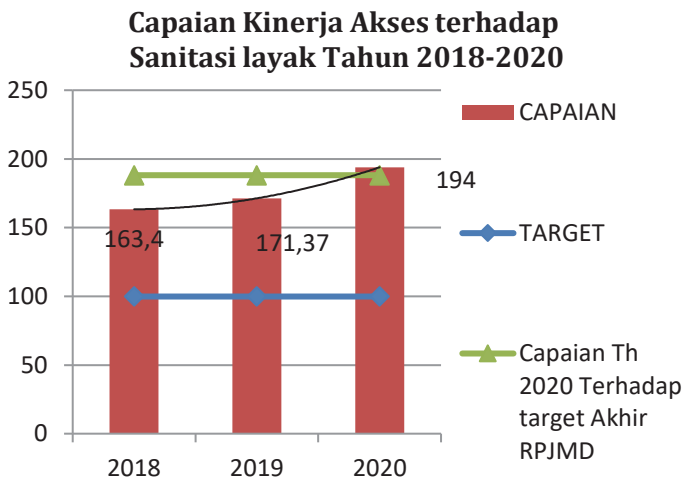
Pada tahun 2020, Pemkab Dharmasraya menetapkan target angka akses air minum yang layak sebesar 26,29%. Target tersebut terealisasi sebesar 18,41%, dengan capaian 70,03 %.

Untuk akses air minum layak ini dihitung hanya dari pelayanan system perpipaan saja sesuai dengan kegiatan yang ada pada program pengembangan air minum dan air limbah, adapun tingkat persentase pelayanan air minum Perpipaan adalah sebagai berikut :

1. SPAM yang dikelola oleh UPT SPAM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari Sambungan Rumah (SR) jumlah penduduk terlayani sebanyak 7.525,- jiwa dengan persentase tingkat pelayanan capaiannya sebesar 3,07 %
1. SPAM Pamsimas yang dikelola oleh masyarakat, jumlah penduduk yang terlayani adalah sebanyak 32.452,- jiwa dengan persentase tingkat pelayanan dengan capaiannya sebesar 13,24 %
3. SPAM yang dikelola Nagari/Jorong jumlah penduduk yang terlayani adalah sebanyak 2.095,- jiwa dengan persentase tingkat pelayanan dengan capaiannya sebesar 0,86 %

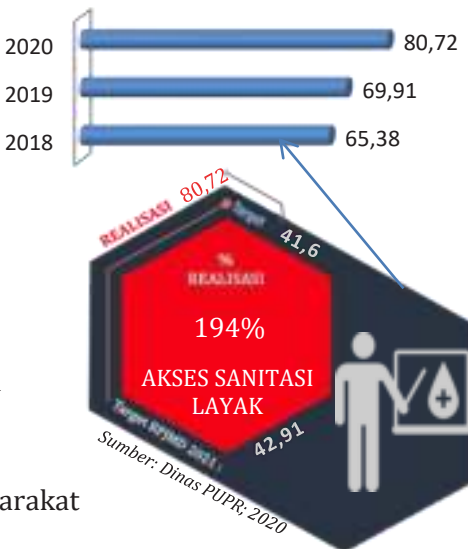


Indikator Akses terhadap Sanitasi layak

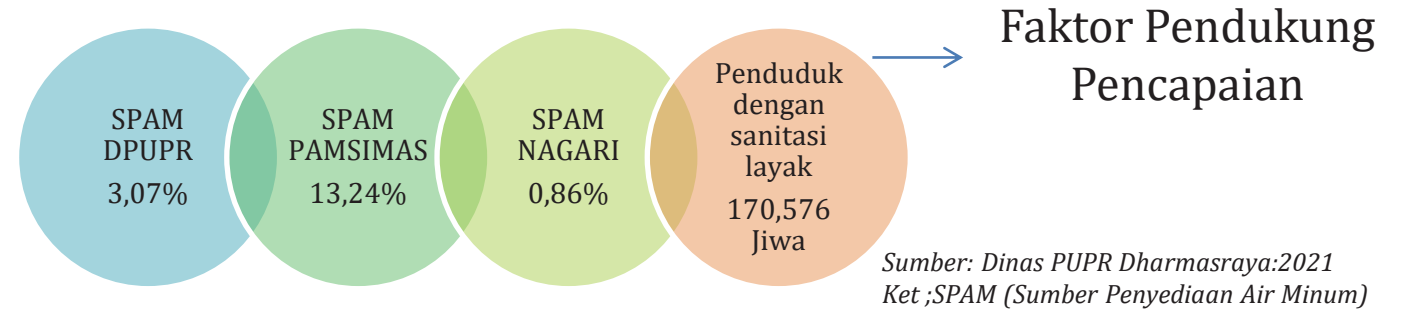


Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. akses sanitasi layak yang ditargetkan sebesar 41,6 persen dan realisasi 80,72 persen dengan capaian 194 persen. Capaian ini meningkat drastis dari tahun 2018 hingga 2020, bahkan jika dibandingkan dengan capaian di akhir RPJMD, Kabupaten Dharmasraya telah menuntaskan masalah akses sanitasi yang layak di masyarakat

Pada indikator Sasaran Akses Sanitasi Layak dengan target 41,6% dengan realisasi 80,72% dan capaian 194 %. realisasi ini di dapat dari jumlah penduduk yang terlayani (jiwa) 170.576,- dibagi jumlah penduduk 245.028 jiwa. sanitasi yang layak di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah dan masyarakat.



Keberhasilan capaian meningkatnya akses dan sanitasi yang layak didorong oleh berbagai program, antara lain adanya perbaikan kinerja PDAM. Selain itu, Pemkab Dharmasraya mendorong kelompok kelompok masyarakat untuk membangun sistem pengelolaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas). Inventarisasi sumber sumber air baku juga terus dilakukan. Pengalokasian anggaran yang proporsional terhadap pengembangan Pamsimas, telah mendorong naiknya akses masyarakat untuk mendapatkan air bersih.



Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 3 Program dan 7 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.827.663.500,- untuk mencapai sasaran ini.

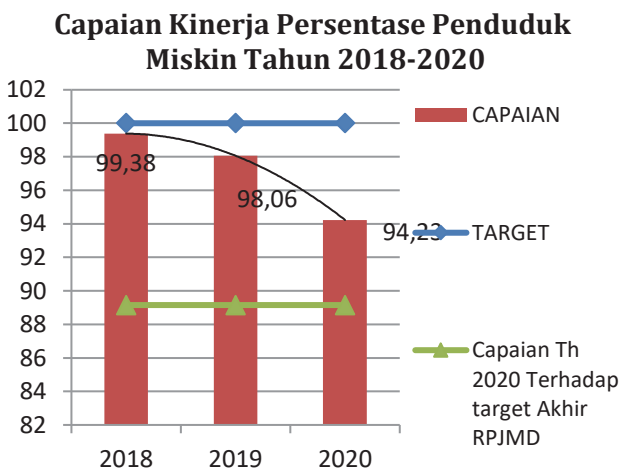
Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.69.545.148, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 79.902.716 artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp10.357.568 per 1% capaian.



Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

INDIKATOR PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

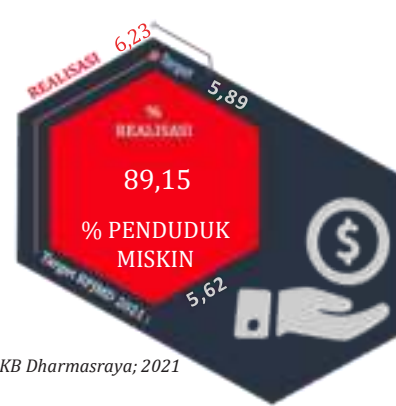
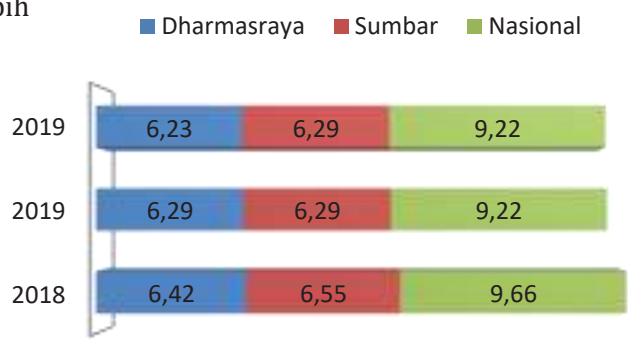
Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi bagian penting dari sasaran kinerja Pemkab Dharmasraya. Keberhasilan sasaran tersebut diukur dengan indikator persentase penduduk miskin. Pada tahun 2020, target persentase penduduk miskin adalah 5,89 persen. target tersebut tercapai dengan sangat baik, yaitu 6,29 persen. Capaian tersebut 98,06 persen atau berketagori sangat berhasil dengan nilai mean 92,5.



Capaian Kinerja menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya Selama tiga Tahun berturut-turut tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya selalu mengalami penurunan, rata-rata penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,26 point, pada tahun 2020 capaian penurunan penduduk miskin sebesar 94,23%, jika dibanding dengan capaian RPJMD, capaian penduduk miskin baru mencapai 89,15%. Hal ini dikarenakan dampak *Covid-19* sehingga pencapaian sasaran ini belum bisa meningkat dari tahun sebelumnya.

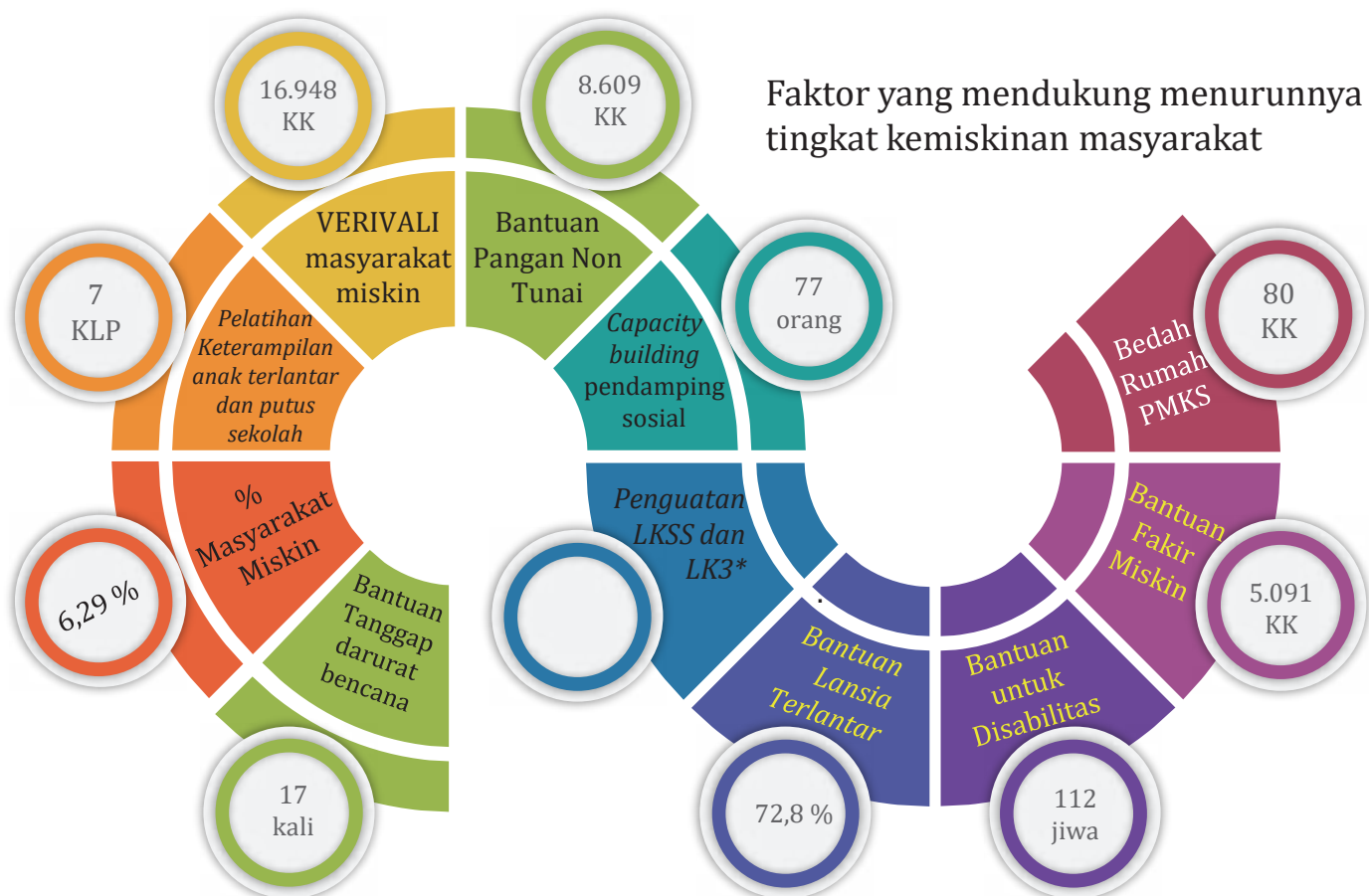
jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya dalam tiga tahun terakhir berada di bawah kemiskinan Nasional, pada tahun 2020 Tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,06 poin , dan jauh lebih

rendah dibanding penduduk miskin nasional 9,22 persen. Kontribusi pengentasan kemiskinan Kabupaten Dharmasraya cukup besar untuk provinsi dan nasional dalam pengentasan kemiskinan.



Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan itu dipicu oleh keberhasilan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Dharmasraya, antara lain program pengentasan kemiskinan. Pemkab Dharmasraya membentuk tim penanggulangan tingkat kemiskinan yang bekerja mengkoordinasikan berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh semua stakeholders

Selain itu, program sektoral terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat juga cukup berhasil, di antaranya intensifikasi pertanian, pengembangan usaha kecil dan menengah dan juga membaiknya iklim usaha di Kabupaten Dharmasraya. Ini secara tidak langsung telah menambah pendapatan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan



Sumber: Dinsos P3APKB Dharmasraya; 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 8 Program dan 15 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.547.554.136,-



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dinilai kurang efisien dibandingkan tahun 2019. karena anggaran yang dialokasikan untuk mencapai 1% pencapaian kinerja lebih besar dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan keadaan kabupaten yang memfokuskan anggaran untuk menanggulangi dampak pandemic Covid-19, sehingga Pemkab lebih memfokuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pokok selama pandemic.

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB



Indikator Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Untuk mengetahui sejauh mana pengembangan sektor pertanian, maka ditetapkan indikator persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Pada tahun 2020, peranan sektor pertanian terhadap PDRB ditargetkan sebesar 29,1 persen. Realisasi yang dapat diwujudkan sebesar 28 persen. Ini berarti tingkat capainnya 96,22 persen atau dalam katagori **sangat berhasil** dengan nilai mean **92,5**.

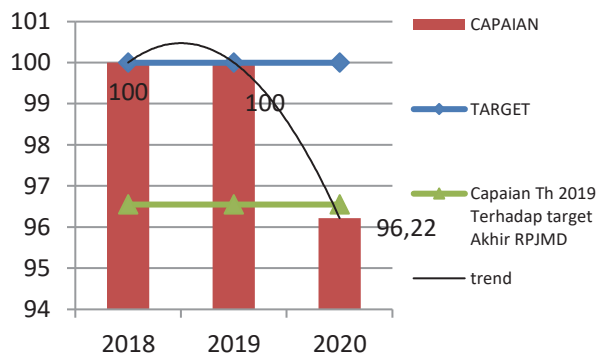
Capaian PDRB terhadap sektor pertanian telah sangat berhasil, capaian indikator tersebut di tahun 2020 telah mencapai 96,22%, capaian ini hamper mencapai target yang ditetapkan di akhir tahun RPJMD, hal ini dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah memfokuskan pencapaian sektor pertanian terhadap perkembangan PDRB.

Meskipun Kabupaten Dharmasraya sukses meningkatkan peranan sektor pertanian terhadap PDRB, namun bila dibanding dengan indikator yang sama untuk rata rata Sumatera Barat (21,83 persen) dan nasional (12,37 persen), ternyata angkanya masih jauh lebih tinggi.

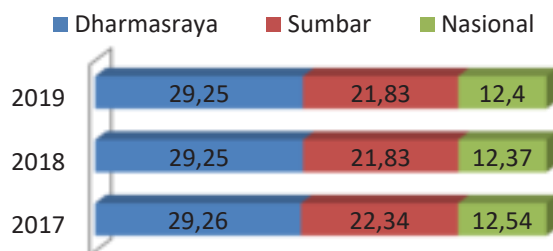
Keberhasilan Pemkab Dharmasraya dalam meningkatkan peranan sektor pertanian terhadap PDRB didukung oleh berbagai program.

Pemkab Dharmasraya menyelenggarakan intensifikasi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam usaha budidaya tanaman pangan, peternakan, perikanan dan juga perkebunan. Selain melaksanakan intensifikasi, Pemkab Dharmasraya juga melaksanakan ekstensifikasi. Dengan demikian produksi pertanian bisa meningkat dan juga pendapatan petani meningkat.

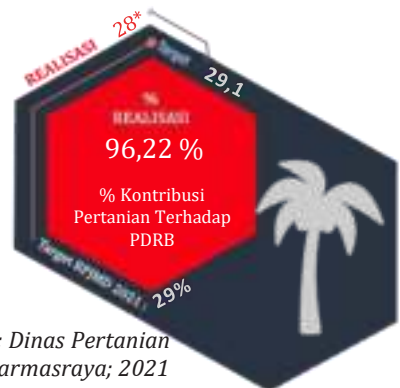
Capaian Kinerja % kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2018-2020



Perbandingan persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

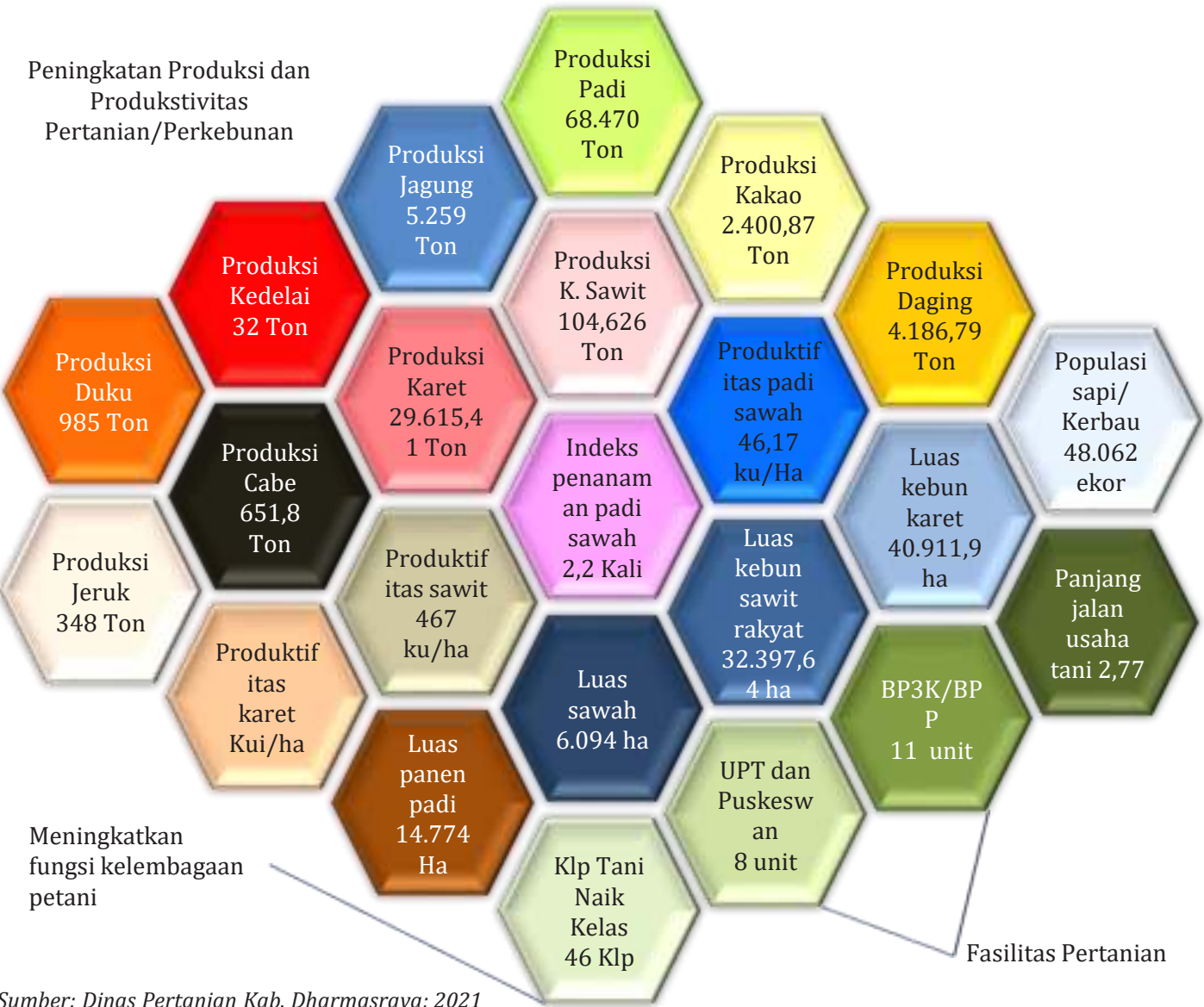


Sumber: Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya; 2021



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya; 2021

Di luar itu, Pemkab Dharmasraya juga membangun jaringan irigasi, mendorong pemberian modal oleh perbankan, membangun pasar dan sarana perhubungan serta mengintroduksi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil. Upaya ini juga mendorong makin besarnya nilai tukar petani di Kabupaten Dharmasraya.



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Dharmasraya; 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 7 Program dan 13 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.643.960.200,-



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.36.387.318, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 103.493.399 artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan 67.106.080 per 1% capaian.



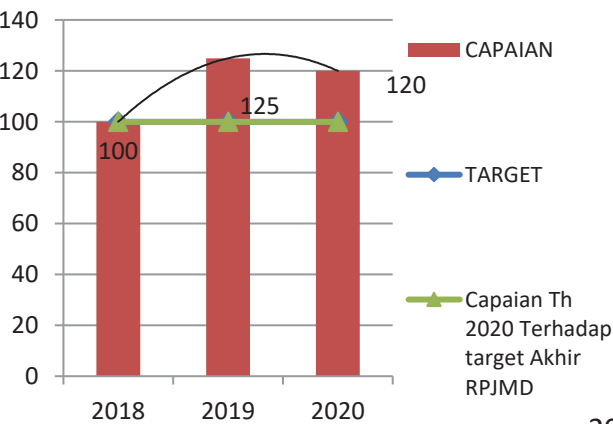
Sasaran Meningkatkan Daya Saing Dunia Usaha dan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Untuk mengukur sasaran meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat, Kabupaten Dharmasraya menetapkan 4 indikator antara lain, 1. jumlah koperasi sehat, 2. pelaku usaha mikro naik kelas, 3. persentase IKM dengan peningkatan Omset, 4. Persentase pasar dalam kondisi baik. Rata-rata capaian sasaran ini sebesar 113,09 dengan kategori **Sangat Berhasil** dengan nilai **Mean 92,5**

1. Jumlah Koperasi Sehat

Untuk indikator jumlah koperasi sehat, Pemkab Dharmasraya menargetkan 25 unit pada tahun 2020. target tersebut bisa dicapai dengan sangat baik sebesar 30 unit. Itu berarti capaian indikator tersebut sebesar 120 persen. Pencapaian jumlah koperasi sehat di Kabupaten Dharmasraya sudah sangat berhasil, dan sudah mencapai target RPJMD tahun 2021.

Capaian Jumlah Koperasi Sehat Tahun 2018-2020



Untuk meningkatkan kualitas manajemen koperasi, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan melaksanakan pembinaan terhadap koperasi dan pelatihan pengelolaan simpan pinjam koperasi.

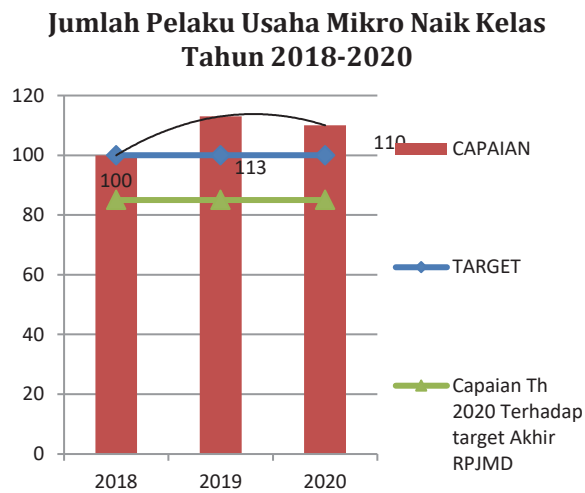
Keberhasilan capaian indikator tersebut itu didukung oleh langkah dan kebijakan Pemkab Dharmasraya dalam pembinaan koperasi. Pemkab Dharmasraya mengintensifkan pembinaan koperasi, terutama yang menyangkut dengan organisasi, keanggotaan dan juga unit usaha yang dilakukan oleh koperasi sehingga koperasi sangat berperan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Setiap koperasi didorong untuk melaksanakan rapat anggota tahunan tepat waktu dan mematuhi anggaran dasar yang ada.



Sumber: Diskumprdag Dharmasraya, 2021

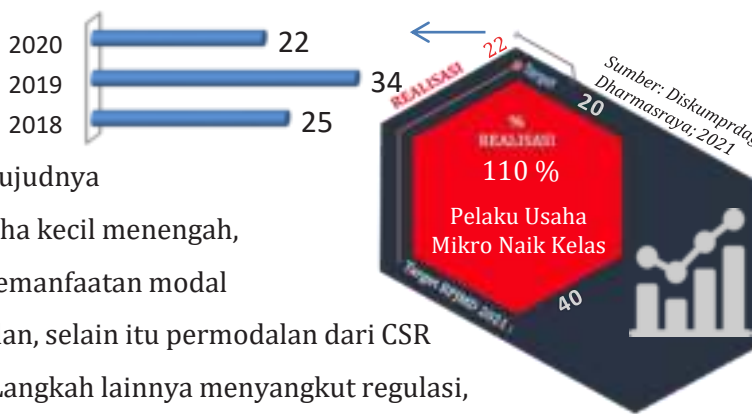
2. Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas

Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas adalah jumlah pelaku usaha mikro yang telah meningkat dan memenuhi kriteria skala usaha kecil. Pada tahun 2020, pengusaha mikro yang naik kelas ditargetkan 20 unit. Target tersebut bisa dicapai dengan sangat berhasil. Bahkan realisasinya melampaui angka yang ditargetkan, yaitu 22 unit atau 110% dengan kategori sangat berhasil



Pemkab Dharmasraya juga mendorong terwujudnya kemitraan antara pengusaha mikro dengan pengusaha kecil menengah, terutama dalam pemasaran produksi, mendorong pemanfaatan modal perbankan dan kontribusi koperasi dalam permodalan, selain itu permodalan dari CSR perusahaan perusahaan besar yang ada di daerah. Langkah lainnya menyangkut regulasi, dimana perizinan dan keamanan dipermudah dan distabilkan. Oleh karena itu, dalam tiga tahun terakhir, kenaikan kelas bagi usaha mikro cenderung mengalami peningkatan.

Pelaku usaha mikro naik kelas ini didorong oleh keberhasilan Pemkab Dharmasraya dalam membangun iklim kondusif bagi berkembangnya dunia usaha mikro, antara lain dengan menciptakan peluang produk bagi usaha mikro, terutama di bidang produk makanan lokal. Pelaku usaha mikro juga diberikan pelatihan teknis terkait dengan pembuatan produk, disain, pemasaran dan manajemen keuangan.



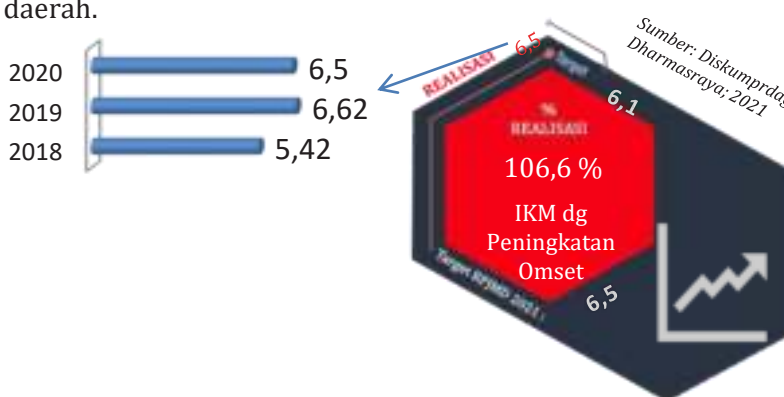
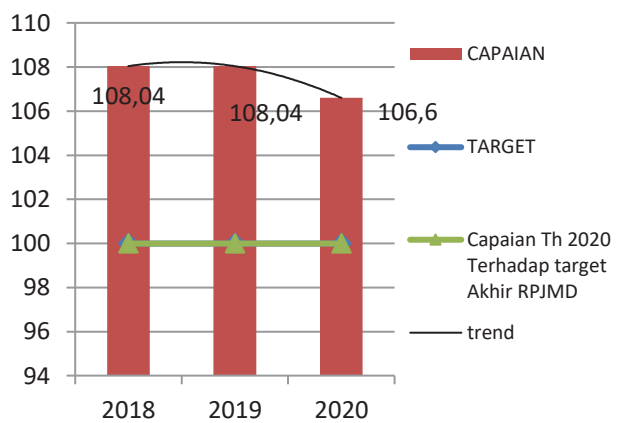
3. persentase IKM Dengan Peningkatan Omzet

Omzet industri kecil dan menengah (IKM) yang mengalami peningkatan di tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,7 persen. Namun kenyataannya target tersebut bisa dicapai hingga 116,14 persen. Ini merupakan capaian yang sangat berhasil, sehingga pada akhir 2019 IKM yang mengalami peningkatan Omzet mencapai 6,62 persen. Dan telah mencapai target tahun akhir RPJMD.

Peningkatan omzet IKM ini Didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Dharmasraya, seperti promosi produk-produk lokal di berbagai daerah.

Pemkab Dharmasraya selalu mengikutsertakan pelaku IKM untuk mengikuti pameran di berbagai daerah. dengan demikian ada peningkatan penjualan yang mengakibatkan sejumlah IKM mengalami peningkatan Omzet.

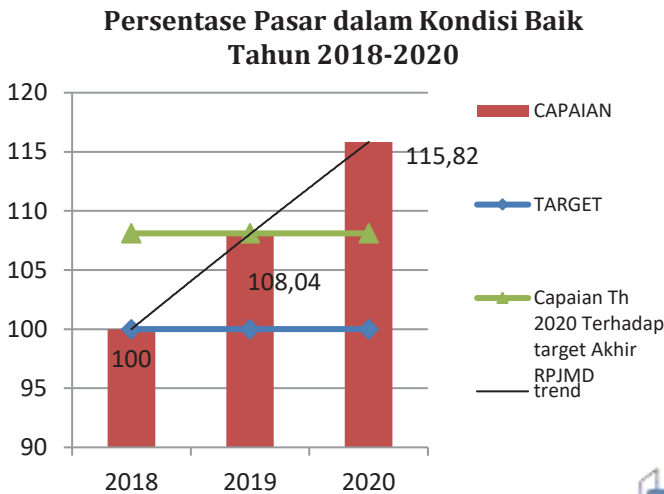
Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet Tahun 2018-2020



Selain mendorong peningkatan pemasaran, Pemkab Dharmasraya juga membantu peningkatan efisiensi biaya produksi, sekaligus meningkatkan produksi dengan cara menyediakan bahan baku yang lebih murah melalui kerjasama dengan koperasi, mendorong agar seluruh ASN memakai produk batik yang diproduksi oleh UKM di Kabupaten Dharmasraya

4. Persentase Pasar dalam Kondisi Baik

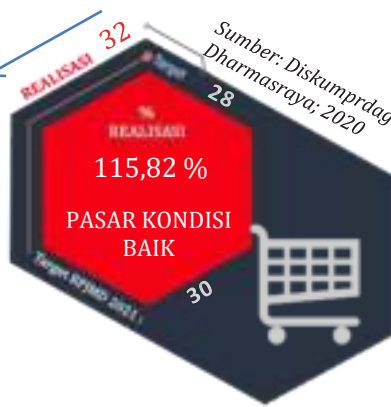
Pembangunan pasar, baik pasar nagari maupun pasar kabupaten terus diupayakan agar persentase pasar dalam kondisi baik terus meningkat. Tahun 2020, target persentase pasar dalam kondisi baik sebesar 28%, terealisasi 32,43% dengan capaian 115,82%.



Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebanyak 8 pasar, Jika diakumulasikan dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020 Jumlah pasar dalam kondisi baik sudah berjumlah 32 Pasar atau sebesar 115,82%. dibandingkan dengan target akhir renstra sudah tercapai sebesar 98 %. Jumlah seluruh pasar rakyat pada tahun 2020 adalah sebanyak 37 pasar.

Peningkatan persentase pasar dalam kondisi baik ini didukung oleh pelaksanaan berbagai program.

Beberapa program di antaranya adalah pembangunan los dan kios di pasar tradisional. Selain membangun kios dan los, juga memperbaiki drainase, mengelola persampahan dan menata perparkiran di area pasar.



Faktor Pendukung Pencapaian

Sumber: Diskumprdag Dharmasraya; 2021

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 7 Program dan 13 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.583.751.665,- untuk mencapai sasaran ini.

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.58.214.502, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 277.636.522 artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp219.422.020 per 1% capaian.



BIDANG SOSIAL BUDAYA



Meningkatnya
Kualitas Birokrasi
Pemerintahan

Indikator

1. Hasil Evaluasi AKIP
(T:BB / R: B)
Capaian 89,4%
2. Nilai LPPD
(T:3,3 / R : 3,51)
Capaian :106%

MEAN 92,5
KATEGORI
SANGAT BERHASIL

MEAN 92,5
KATEGORI
SANGAT BERHASIL

Indikator

1. Persese capaian RPJMD
(T:95% / R: 104%)
Capaian 109,9%
2. Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan (T: WTP /R : WTP)
Capaian :100%

Meningkatnya
efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan
pembangunan

Meningkatkan status
pembangunan
nagari

Indikator

- Persentase nagari
tertinggal dan sangat
tertinggal
(T: 15,38% / R: 7,69)
Capaian : 150%

MEAN 92,5
KATEGORI
SANGAT BERHASIL

MEAN 92,5
KATEGORI
SANGAT BERHASIL

Indikator

1. Jumlah Grup Kesenian Daerah yg
dilestarikan
(T:30 / R: 30)
Capaian 100%
2. % Lembaga adat aktif (T: 100%
/R : 100%) Capaian 105%
3. Jumlah Cagar Budaya yg
dilestarikan
(T:20/ R: 11) Capaian 55%

Meningkatnya
pelestarian
Budaya Daerah

Bidang Sosial Budaya ditetapkan 4 sasaran dengan 8 indikator, seluruh sasaran mendapatkan prediket **SANGAT BERHASIL**, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan Bidang Sosial Budaya yang menjadi identitas Kabupaten Dharmasraya.



Meningkatnya Kualitas Birokrasi Pemerintahan

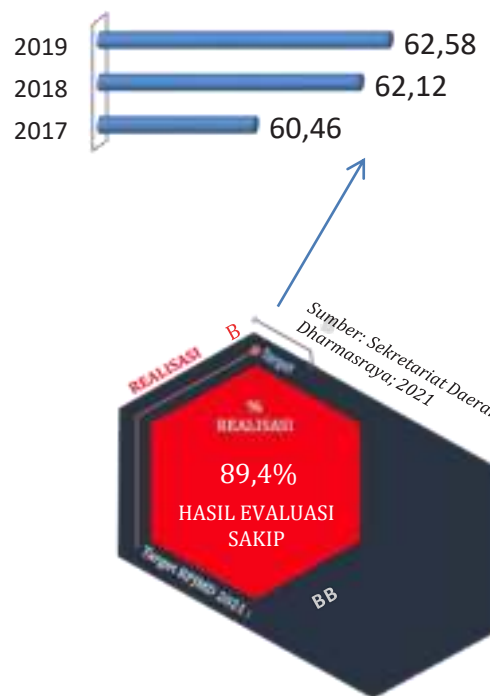
Sasaran Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Hasil Evaluasi AKIP dan Nilai LPPD, dari kedua indikator tersebut, didapatkan nilai rata-rata tertimbang sebesar 97,88 dengan nilai Mean 92,5 dan termasuk kedalam kategori **Sangat Berhasil**

1. Hasil Evaluasi AKIP

Pada tahun 2019 hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Dharmasraya ditargetkan mendapat predikat B. Target tersebut tercapai 100 persen. Namun di tahun 2020, nilai hasil evaluasi AKIP hingga laporan ini diserahkan, nilai belum diterbitkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), sehingga Pemerintah Dharmasraya mengambil data capaian di tahun 2019 sebagai tolak ukur pencapaian di Tahun 2020.

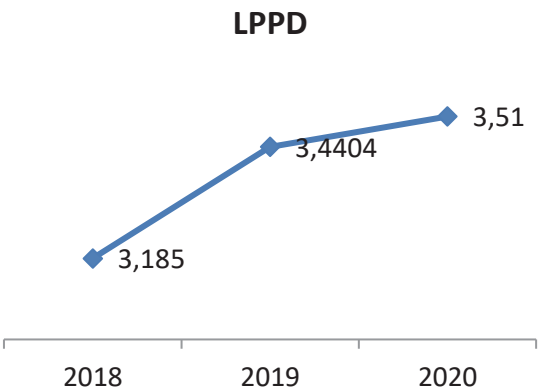
Pencapaian AKIP Kabupaten Dharmasraya dalam 3 tahun terakhir belum mencapai target mendapatkan prediket BB, hal ini dikarenakan anggaran difokuskan untuk menanggulangi dampak pandemi *Covid-19* sehingga untuk mencapai sasaran ini alokasi anggaran di refocusing..

Keberhasilan mencapai target tersebut didukung oleh makin baiknya kualitas perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja. Selain itu ada keselarasan antar dokumen perencanaan baik daerah maupun OPD. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan juga ditingkatkan melalui evaluasi internal. Khusus hasil evaluasi AKIP ini, predikat yang diperoleh Kabupaten Dharmasraya masih dibawah perolehan provinsi yang mendapat nilai (BB). Ini berarti, meski capaian nilai AKIP sangat baik, namun ke depan Pemkab Dharmasraya harus terus melakukan perbaikan dalam penerapan SAKIP, supaya bisa mendapatkan nilai terbaik.



2. Nilai LPPD

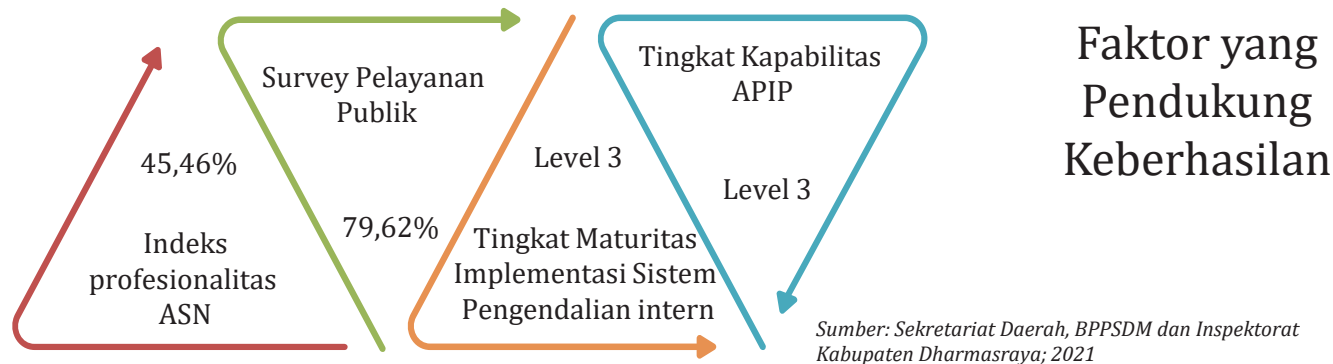
Pada tahun 2020 telah disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019. Hasil laporan yang telah disusun tersebut disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan telah dievaluasi oleh Tim EKPPD Provinsi dan Nasional. Hasil evaluasi LPPD di tahun 2019 ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari angka 3,1856 di tahun 2018 menjadi 3,5100 ditahun 2020.



Nilai ini meningkat menjadi 3,51 di tahun 2019 dengan status sangat tinggi (peringkat I di Provinsi Sumatera Barat). Kenaikan tersebut terjadi karena untuk penyusunan tahun 2019 disertai dengan data-data pendukung yang lengkap.

Nilai terhadap Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim EKPPD Daerah dan Nasional dan kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Peningkatan nilai LPPD ini, karena didukung oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya sumberdaya aparatur, dan makin lengkapnya fasilitas daerah serta adanya berbagai inovasi diantaranya mobil capil keliling, donor darah keliling dan berbagai



Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas birokrasi pemerintahan di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 8 Program dan 454 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.291.597.735,-



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas birokrasi pemerintah dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.605.746.796, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 955.468.876 artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp349.722.080 per 1% capaian.

Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Pembangunan



Sasaran efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase capaian RPJMD (IKU Daerah) dengan capaian dan OPINI BPK terhadap laporan keuangan dengan capaian 100%. Dari ke 2 (dua) indikator ini, didapatkan rata-rata capaian sasaran 107,11 dengan kategori **Sangat Berhasil** dan Nilai **Mean 92,5**

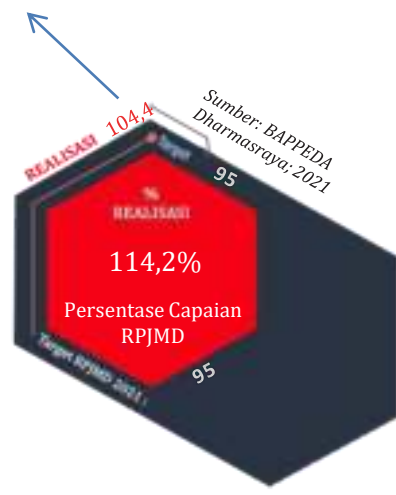
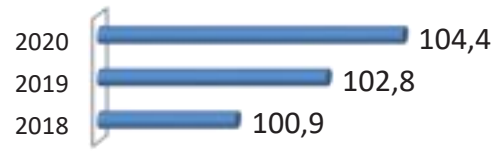
1. Capaian RPJMD (IKU Daerah)

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu bagian yang ingin diwujudkan. Salah satu ukurannya adalah persentase capaian RPJMD. Pada tahun 2020, persentase capaian RPJMD sebesar 104,4 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 95 persen dengan capaian sebesar 108,9%.

Pengukuran capaian RPJMD dihitung berdasarkan rata-rata capaian dari seluruh sasaran indikator yang dicapai dalam indikator kinerja utama daerah, dari 15 sasaran dan 25 indikator yang ditetapkan, didapatkan rata-rata capaian yang didapatkan sebesar 104,4%

Capaian tersebut itu dinilai sangat berhasil dan terus mengalami peningkatan dalam hal poin yang didapat dalam tiga tahun terakhir. Prestasi tersebut didukung dengan adanya sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan dan juga komitmen pimpinan daerah dan kepala OPD yang tinggi untuk mewujudkan target dan indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Mantapnya koordinasi antar unit kerja, membaiknya kualitas sumberdaya aparatur, adanya inovasi teknologi informasi telah memungkinkan adanya percepatan terhadap realisasi pembangunan sesuai dengan pentahapan yang telah ditetapkan. Dan juga makin lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah telah mendorong adanya percepatan realisasi RPJMD setiap tahunnya.



2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Sementara itu, untuk indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan yang ditergetkan memperoleh opini WTP dapat direalisasi sesuai yang ditargetkan (100 persen).

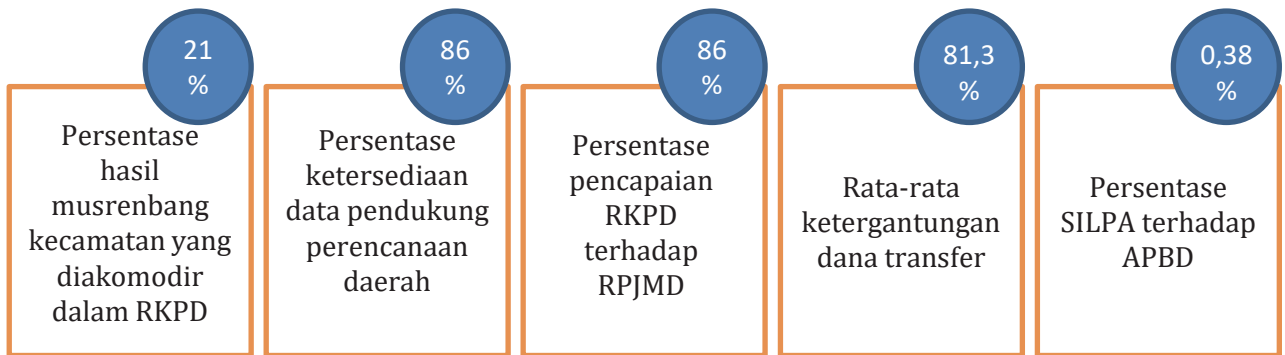
Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Kabupaten Dharmasraya dapat mempertahankan opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan prediket WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Hal tersebut didukung oleh komitmen yang sangat tinggi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan seluruh peraturan yang menyangkut dengan akuntansi pemerintah. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Dharmasraya telah dilaksanakan dengan memenuhi standar akuntansi pemerintah.

Ini dimungkinkan karena pemerintah daerah terus mendorong aparatur sipil negara untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan terkait dengan akuntansi keuangan. Pemerintah daerah mendorong adanya proses belajar bagi aparatur sipil negara untuk terus mengasah kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan agar pengelolaan keuangan benar benar memenuhi standar akuntansi negara.



Faktor yang Pendukung Keberhasilan



Sumber: BAPPPEDA dan BKD Dharmasraya; 2021

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 27 Program dan 209 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.857.168.329,-



Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.608.468.505, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 640.533.506 artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp32.065.001 per 1% capaian.

Meningkatnya status Pembangunan Nagari



Indikator Persentase Nagari Tertinggal dan Sangat Tertinggal

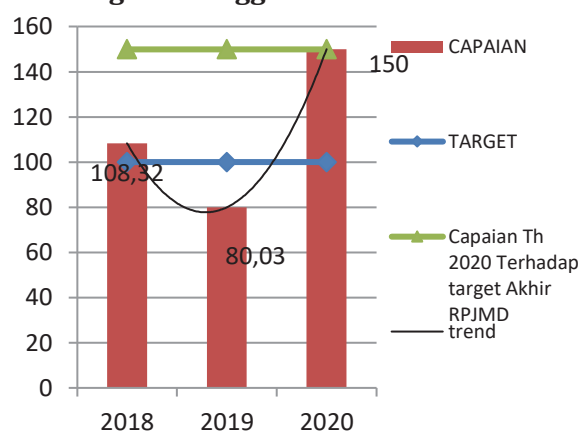
Keberhasilan pembangunan nagari ini dapat dilihat dari persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal. Pada tahun 2020 persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal ditarget 15,38 persen. Target tersebut bisa dicapai 7,69 persen atau hanya 4 nagari yang masih tertinggal dan sangat tertinggal. Capaian ini bahkan telah melebihi target sasaran akhir tahun RPJMD.

Capaian persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Dharmasraya telah melebihi capaian Nasional, namun masih dibawah angka Provinsi Sumatera Barat.

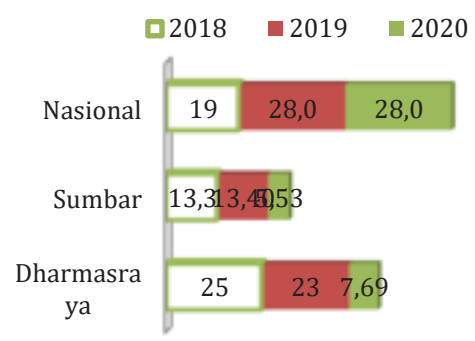
Keberhasilan pencapaian sasaran Status Pembangunan Nagari di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menetapkan 5 Program dan 9 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.970.916.554.

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas birokrasi pemerintah dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.3.970.926, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 99.494.489 artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp.95.523.563 per 1% capaian.

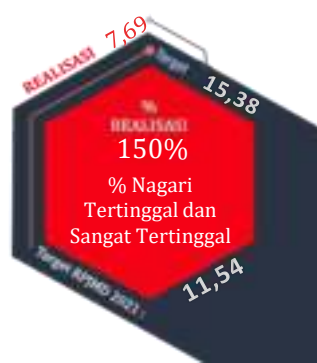
Persentase nagari Tertinggal dan sangat tertinggal Tahun 2018-2020



Capaian % Nagari Tertinggal dibandingkan Provinsi dan Nasional



Sumber: Dinas PMD Dharmasraya; 2021





Sasaran meningkatnya pelestarian budaya daerah diukur dengan 3 indikator antara Persentase lembaga adat yang aktif dengan capaian 100%, jumlah cagar budaya yang dilestarikan dengan capaian 100% dan jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan dengan capaian 100%. Rata-rata capaian sasaran meningkatnya pelestarian budaya daerah sebesar 100% dengan Kategori **Sangat Berhasil** dan **Mean 92,5**,

1. Jumlah Group Kesenian Daerah yang dilestariakan

Jumlah Kesenian Daerah yang dilestariakan ditargetkan sebesar 30 group. Jumlah tersebut dapat direalisasikan sebanyak 30 group dengan capaian 100 persen. Tercapainya target tersebut dipicu oleh keberhasilan berbagai program yang diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya. Salah satu program yang sukses adalah adanya event event yang memperlombakan penampilan aneka kesenian daerah.

Dari sasaran meningkatnya pelestarian budaya daerah yang didukung tiga indikator diperoleh nilai mean sebesar 92,5 atau dengan kategori sangat berhasil.



Sumber: Disbudparpora Dharmasraya; 2021

2. Persentase lembaga adat yang aktif

Target persentase lembaga adat yang aktif pada tahun 2020 adalah 100 persen. Tercapai sebesar 100 persen dan capaiannya juga 100 persen. Ini berarti lembaga adat di Kabupaten Dharmasraya dalam kondisi aktif.

Faktor yang mendorong aktif dan tidaknya lembaga adat adalah pengelolaan, pendanaan dan juga dukungan masyarakat. Pemkab Dharmasraya telah mengalokasikan anggaran untuk insentif para pemangku adat. Selain itu, juga memberikan peran dan ruang bagi lembaga adat untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.



Sumber: Disbudparpora Dharmasraya; 2021

Meskipun telah dinilai sangat berhasil, namun ke depan Pemkab Dharmasraya harus lebih akomodatif lagi terhadap lembaga adat, terutama dalam ikut serta melastariakan budaya dan tradisi serta penerapan nilai nilai luhur yang ada di dalamnya.



3. Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan

Pada tahun 2019, Pemkab Dharmasraya menargetkan cagar budaya yang ditetapkan sebanyak 11 unit, dan tercapai 11 unit dengan capaian 100%. Seluruh unit cagar budaya yang ditetapkan telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Dharmasraya untuk menjadi cagar budaya yang dilestarikan pemerintah daerah.

Pencapaian tersebut dapat terlaksa atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Kebudayaan, bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat di Batusangkar dan Balai Arkeologi Sumatera Utara di Medan. dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga bidang Kebudayaan hanya sebagai Pendamping kegiatan yang dilakukan tersebut. Hal dikarekan oleh tinginya Biaya Ekskavasi yang dibutuhkan belum terakomodir oleh pemerintah daerah.

Kedepan, Pemkab Dharmasraya harus membangun kerjasama dengan lembaga - lembaga kepurbakalaan agar dapat membantu menetapkan cagar budaya dan melestarikannya untuk keperluan wisata, penelitian dan juga pembelajaran (education).

Keberhasilan pencapaian sasaran Pelestarian Budaya Daerah di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan 6 Program dan 12 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.970.916.554,-

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.608.468.505, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 640.533.506 artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp32.065.001 per 1% capaian.



Sumber: Disbudparpora Dharmasraya; 2021



4. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP



Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup

1. Indikator Indek Kualitas Lingkungan Hidup

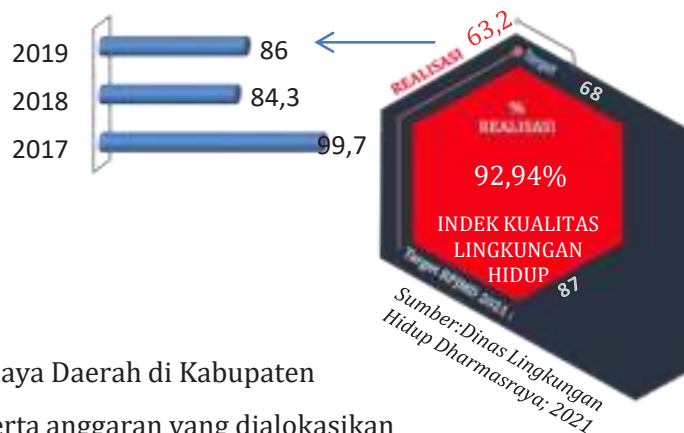
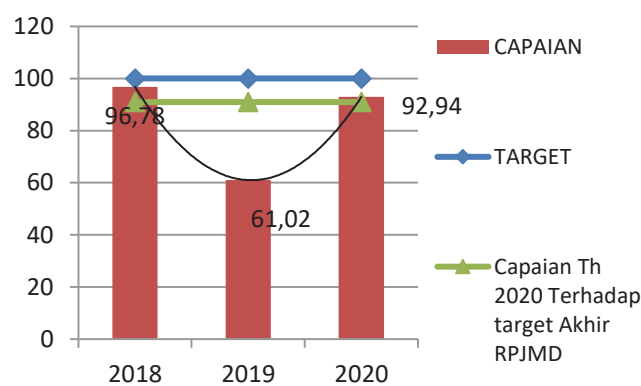
Pada tahun 2020, indeks kualitas lingkungan di Kabupaten Dharmasraya ditargetkan 68 indek. dari target tersebut dapat direalisasi sebesar atau dengan capaian 63,2 indek, dengan capaian 92,94% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Keberhasilan ini didukung oleh adanya upaya Pemkab Dharmasraya untuk menjamin indeks kualitas udara, indeks kualitas air dan tutupan lahan dalam kondisi yang baik, selain itu, Pemkab juga menjamin dalam penanggulangan kebakaran hutan dan juga mengendalikan sumber-sumber polusi udara. Selain itu, Pemkab Dharmasraya juga berhasil dalam kegiatan menanam pohon.

Keberhasilan pencapaian sasaran Pelestarian Budaya Daerah di Kabupaten Dharmasraya tidak terlepas dari program dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan 9 Program dan 20 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,856.185.892,-

Akuntabilitas keuangan terhadap capaian kinerja sasaran meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dinilai efisien dibandingkan tahun 2019. karena untuk mendapatkan 1% pencapaian sasaran ditahun 2020 Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.30.731.114, lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dimana realisasi anggaran untuk mendapatkan 1% capaian sebesar Rp. 44.446.731 artinya di tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya telah mengefisienkan Rp13.715..617 per 1% capaian.

Indeks Kualitas Air Tahun 2018-2020



B. REALISASI ANGGARAN

PROGRAM	KEGIAT AN	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	2.237.076.002	2.209.791.685
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	3	225.205.000	211.296.000
Program kesehatan jiwa			
Program Pengawasan Obat dan Makanan	2	231.391.000	172.910.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4	213.170.000	197.491.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2	183.000.000	182.336.500
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	4	1.461.796.250	446.637.904
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	4	17.289.249.998	16.310.281.308
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	1	7.850.415.000	7.839.936.300
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	1	52.452.000	32.182.000
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1	278.085.000	248.012.500
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	3	1.310.804.395	1.256.120.712
Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	1	693.935.000	534.257.650
Program Bantuan Operasional kesehatan	16	10.394.450.000	10.223.171.359
Program Keluarga Berencana	4	3.815.827.000	3.746.695.243
Program Kesehatan Reproduksi Remaja		-	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1	93.485.000	92.482.750
Program Pembinaan dan Permayarakatan Olah Raga	1	541.398.000	539.580.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	8	14.326.502.803	12.248.829.373
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	6	47.781.950.000	46.401.276.548
TOTAL PER SASARAN	64	108.980.192.448	102.893.288.831
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat			
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	1	87.140.000	82.926.000
Program peningkatan peran serta kepemudaan	2	5.767.500	5.767.500
Program Pendidikan Anak Usia Dini	10	1.490.176.000	1.340.998.948
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	25	42.871.726.500	41.162.352.443
Program Pendidikan Non Formal	4	336.586.825	278.166.700
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	5.093.676.500	5.076.576.500
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5	1.699.120.000	1.603.151.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	34.116.500	33.772.000
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	1	33.297.800	33.297.800
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	1	24.495.250	24.495.250
TOTAL PER SASARAN	52	51.676.102.875	49.641.504.141

PROGRAM	KEG	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya ketahanan pangan			
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1	71.000.000	64.151.500
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	7	185.636.400	185.482.150
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	0	-	-
Program pengembangan kawasan budidaya perikanan	3	1.114.721.850	1.109.208.000
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	1	4.859.000	4.859.000
Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan	1	122.910.000	122.410.000
TOTAL PER SASARAN	13	1.499.127.250	1.486.110.650
Meningkatnya kesetaraan gender			
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7	789.836.134	773.647.034
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1	58.713.500	58.713.500
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1	19.680.500	19.680.500
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1	52.541.000	52.541.000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	398.685.000	393.031.550
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	2	203.836.750	197.484.639
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	24.317.950	22.957.200
Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	1	15.087.500	14.718.000
TOTAL PER SASARAN	15	1.562.698.334	1.532.773.423
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan			
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1	858.014.500	852.833.400
Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1	195.674.150	195.501.150
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1	144.999.500	143.620.000
Program pembangunan jalan dan jembatan	3	30.108.316.544	29.145.088.884
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2	3.027.750.000	3.025.878.000
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2	728.511.900	727.989.275
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	4	1.788.820.000	1.133.331.922
Program Pengembangan Tata Ruang	1	597.861.000	597.111.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	2	7.051.125.000	6.853.318.955
Program Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi	1	390.000	390.000
TOTAL PER SASARAN	18	44.501.462.594	42.675.062.586
Meningkatnya kualitas perumahan			
Program Pengembangan Perumahan	5	2.401.975.651	2.392.291.421
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	1	77.814.000	77.814.000
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1	104.062.500	103.652.240
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1	2.914.000	2.914.000
Program Perencanaan Tata ruang	2	48.566.900	48.311.900
TOTAL PER SASARAN	10	2.635.333.051	2.624.983.561
Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak			
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1	125.067.000	125.067.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5	7.604.899.500	6.996.437.355
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1	2.097.697.000	2.060.718.400
TOTAL PER SASARAN	7	9.827.663.500	9.182.222.755

PROGRAM	KEG	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB			
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1	760.000.000	759.959.750
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3	1.242.221.000	1.235.709.600
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1	210.610.050	209.794.077
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1	35.006.700	33.101.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4	429.341.950	295.893.600
program Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/Peternakan/Perkebunan	1	362.483.700	362.477.750
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	2	604.296.800	604.249.500
TOTAL PER SASARAN	13	3.643.960.200	3.501.185.277
Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat			
Program peningkatan daya saing koperasi dan UKM	4	492.879.732	422.106.596
Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	1	9.764.400	9.764.400
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2	1.636.786.795	1.636.595.555
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	1	1.734.351.955	1.733.815.127
Program pengembangan perdagangan	2	4.969.250	3.567.250
Program pengembangan industri kecil dan menengah	2	2.781.471.838	2.737.968.237
Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	1	39.937.150	39.934.500
TOTAL PER SASARAN	13	6.700.161.120	6.583.751.665
Menurunnya Tingkat Kemiskinan			
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2	92.350.350	92.350.350
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	8.689.750	8.689.750
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	16.623.400	16.623.400
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	43.980.000	43.883.334
Program pengembangan pemasaran pariwisata	3	116.825.795	116.825.795
Program pengembangan destinasi pariwisata	2	2.216.599.800	2.080.238.114
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1	9.497.000	9.497.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	4	42.988.041	42.988.041
TOTAL PER SASARAN	15	2.547.554.136	2.411.095.784
Meningkatnya pemanfaatan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi-fungsi lingkungan hidup			
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	3	1.920.100.000	1.704.430.350
Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	1	32.275.500	32.006.250
Program Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana	1	2.050.000	2.050.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	378.520.000	378.500.800
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5	219.060.896	218.400.392
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4	15.517.250	15.409.500
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	3	18.402.000	18.402.000
Program pengendalian kebakaran hutan	1	482.995.750	482.498.100
Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	1	4.513.500	4.488.500
TOTAL PER SASARAN	20	3.073.434.896	2.856.185.892

PROGRAM	KEG	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan			
Program Pendidikan Kedinasan *)	2	50.706.710	50.406.710
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur *)	12	425.157.097	412.967.750
Program Penataan Administrasi Kependudukan	7	1.026.203.500	996.543.378
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2	785.881.500	783.686.636
Program kerjasama informasi dengan mas media	1	55.225.450	55.134.251
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan media masa *)	1	8.668.750	8.668.750
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	2	28.694.350	28.526.500
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah	1	19.750.116	19.750.116
Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	2.400.000	2.400.000
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	8	1.005.832.730	1.005.093.250
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1	91.672.860	91.672.860
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	8	18.134.564.550	16.571.176.552
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	4	2.206.925.000	2.003.881.928
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2	2.651.400.000	2.651.394.679
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	7	298.789.777	298.512.727
Program Optimalisasi Lelang terpadu	8	821.457.700	819.612.868
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	3	910.657.200	910.531.100
Program Koordinasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kerja	4	225.918.450	225.831.677
Program Koordinasi Pemerintahan dan Otda	10	440.166.658	439.908.208
Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	6	1.461.786.006	1.441.684.682
Program Koordinasi Perekonomian Dan SDA	8	420.246.150	419.463.746
Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	447.471.937	443.782.065
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88	34.181.704.273	33.550.497.346
Program peningkatan disiplin aparatur	4	528.815.250	527.292.750
Program Koordinasi Kecamatan	11	65.054.000	64.890.000
program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	18.351.500	18.351.500
Program perencanaan kota-kota menengah dan besar	2	15.506.300	15.506.300
TOTAL PER SASARAN	209	66.329.007.814	63.857.168.329
Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan			
Program perencanaan pembangunan daerah	8	980.417.364	977.994.017
Program perencanaan pembangunan ekonomi		-	-
Program perencanaan sosial dan budaya	5	94.312.608	94.112.608
Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah*)	1	3.117.800	3.117.800
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	1	1.936.250	1.936.250
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	19	2.389.152.200	2.207.507.447
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	403	57.729.169.667	55.664.193.111
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17	374.521.373	342.736.502
TOTAL PER SASARAN	454	61.572.627.262	59.291.597.735

PROGRAM	KEG	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatkan status pembangunan nagari			
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	5	187.383.400	186.455.400
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	2	12.607.000	12.607.000
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1	3.975.000	3.975.000
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Nagari*)	0	-	-
Program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	1	392.823.455	392.601.555
TOTAL PER SASARAN	9	596.788.855	595.638.955
Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah			
Program Pengembangan Nilai Budaya	1	189.294.000	189.277.350
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1	35.261.950	34.461.950
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	1.286.709.850	1.284.129.600
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	2	3.629.000	3.629.000
Program peningkatan pendidikan politik masyarakat	3	29.082.200	27.906.700
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	3	426.939.554	411.420.075
TOTAL PER SASARAN	12	1.970.916.554	1.950.824.675
TOTAL KESELURUHAN	924	367.117.030.888	351.083.394.259

C. EFEKTIFITAS PEGAWAI

Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Dharmasraya saat ini berjumlah 3.596 orang, sedangkan kebutuhan pegawai sesuai dengan perhitungan Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja (ANJAB ABK), untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik, Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurang nya membutuhkan 7.420 pegawai, hal ini berarti pegawai di Dharmasraya belum sampai setengah dari yang dibutuhkan.

Namun, kinerja pegawai saat ini telah mencapai hasil yang secara garis besar sangat berhasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan tugas dengan sangat efektif, bahkan melebihi beban kerja yang seharusnya.

Berkat efektifitas kinerja pegawai ini, Kabupaten Dharmasraya sekurang-kurangnya telah mengefisienkan anggaran Rp.58.277.760.000,- selama setahun untuk pemberian tunjangan daerah yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mengefisiensi kan minimal Rp. 92.794.713.600 untuk gaji yang berasal dari dana realisasi umum, sehingga total efisiensi anggaran yang diperoleh dari Efektifitas kinerja pegawai sebesar Rp. 151.072.473.600,-



Nagari Statistik

Nagari statistik adalah bentuk implementasi dari apa yang disebut dukungan data statistik yang akurat, terintegrasi, cepat dan mudah diakses. Adapun tujuan dari pembentukan nagari statistik adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan akurasi data kewilayahan dalam rangka mendukung penentuan arah kebijakan pembangunan, terutama saat ini untuk pemerintahan nagari sendiri. Adapun sasaran yang akan dituju dalam pelaksanaan nagari statistik adalah untuk meningkatkan ketersediaan data sesuai dengan kebutuhan kebijakan pembangunan.

Dampak yang diharapkan adalah semakin baiknya manajemen pemerintah nagari sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, hal ini diharapkan dapat mendukung sasaran strategis ke 12 yaitu **Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan**

SAD TO HAPPY

Inovasi Petugas Registrasi Melayani Anda (Primadona) milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Seluma, dan Suku Anak Dalam Terobos Hutan Demi Pelayanan Adminduk (SAD To Happy) milik Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya berhasil mengatasi berbagai kendala pelayanan adminiduk yang ada di daerah setempat.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Seluma, Irzani, mengungkapkan bahwa pelayanan Primadona pada dasarnya merupakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis zonasi.

Motivasi Primadona adalah adanya kendala geografis, dimana terdapat pertumbuhan penduduk dengan menjadi 213.414 jiwa di seluruh wilayah Kabupaten Seluma yang luasnya 2.444 km², membuat kami harus lebih ekstra dalam menghadapi banyaknya permohonan dokumen kependudukan masyarakat” tambah Irzani.

Sementara itu, di Kabupaten Dharmasraya terdapat fenomena adanya penduduk Suku Anak Dalam (SAD) yang berdiam di hutan Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Sembilan Koto. Adanya SAD yang bertinggal jauh dari pemukiman menjadi tantangan tersendiri bagi Disdukcapil Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk

Paradigma pembangunan yang terus berkembang dan adanya keterbatasan menjadi tantangan pemerintah dalam pembangunan, hal tersebut menuntut Pemda Dharmasraya selalu melakukan langkah strategis berupa melakukan langkah strategis berupa inovasi-inovasi dalam melaksanakan pembangunan supaya layanan Pemda Dharmasraya kepada masyarakat menjadi maksimal. Komitmen Pemda yang tinggi ditunjukkan dengan memunculkan inovasi-inovasi dalam bentuk kebijakan maupun teknis operasional



BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari implementasi SAKIP dapat digambarkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2020. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 15 (Lima belas) sasaran strategis yang diukur oleh 25 (dua puluh lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020.
2. Kategori keberhasilan 25 indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 23 indikator kinerja utama dengan kategori sangat berhasil dengan capaian $> 85\%$
 - b. Sebanyak 1 indikator kinerja utama dengan kategori berhasil dengan capaian 70- 85%
 - c. Sebanyak 1 indikator kinerja utama dengan kategori tidak berhasil dengan capaian $\leq 55\%$.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum atau tidak memenuhi target, kami menyadari semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala

kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

KABUPATEN DHARMASRAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN
Jabatan : BUPATI DHARMASRAYA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pulau Punjung, 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	SASARAN	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	71,23
2	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,57
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,07
3	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,44
4	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	89,84
		Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	50,19
5	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen	59,49
6	Meningkatnya kualitas perumahan	Rasio rumah layak huni	Persen	88,73
7	Meningkatnya akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Akses air minum layak	Persen	26,29
		Akses Sanitasi Layak	Persen	41,6
8	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	29,1
9	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Persen	5,89
10	Meningkatnya kualitas mutu air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	69
11		Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,5
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	51
12	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan	Persentase Capaian RPJMD (IKU Daerah)	Persen	95
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WD P/TW/disclaimer	WTP
13	Meningkatnya kualitas Birokrasi Pemerintahan	Hasil evaluasi AKIP	Predikat/nilai	BB
		Nilai LPPD	Predikat/nilai	3,3000 (tinggi) naik peringkat

	Meningkatkan status pembangunan nagari	Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	15,38
14	Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah	Jumlah grup kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	30
		Persentase Lembaga Adat Yang Aktif	Persen	100
		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	Unit	20

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 60.147.923.766
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 75.315.953.915
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp 596.457.913
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 2.404.156.160
5	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rp 46.486.783.000
6	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 200.700.000
7	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Rp 1.317.020.600
8	Program Koordinasi Kecamatan	Rp 77.328.750
9	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 3.808.742.500
10	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp 1.520.067.700
11	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp 44.159.950.900
12	Program Pendidikan Non Formal	Rp 340.410.825
13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 5.785.667.900
14	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp 3.844.760.750
15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp 2.127.076.002
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 225.205.000
17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 231.361.000
18	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 213.170.000
19	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp 71.000.000
20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp 183.000.000
21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp 403.620.000
22	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp 1.527.248.250
23	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp 17.348.514.998
24	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp 9.850.415.000

25	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Rp	52.452.000
26	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp	428.085.000
27	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Rp	12.926.948.184
28	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	60.523.500
29	Program Jaminan Persalinan (Jampersal)	Rp	693.935.000
30	Program Bantuan Operasional kesehatan	Rp	12.244.050.000
31	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Rp	43.000.000.000
32	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp	59.143.175.000
33	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp	2.983.800.000
34	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Rp	1.453.900.000
35	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Rp	3.150.387.500
36	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp	13.078.951.500
37	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Rp	4.566.175.000
38	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Rp	6.187.900.000
39	Program Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi	Rp	185.600.000
40	Program Pengembangan Perumahan	Rp	2.939.157.500
41	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp	1.779.935.000
42	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Rp	86.453.250
43	Program peningkatan pendidikan politik masyarakat	Rp	91.862.500
44	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp	124.848.000
45	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp	315.688.500
46	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp	19.290.000
47	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	56.825.000
48	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Rp	38.980.750
49	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Rp	45.609.000
50	Program Penanganan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp	19.580.000
51	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	30.205.000
52	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	186.962.450
53	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	24.217.000
54	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp	81.608.250
55	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp	43.980.000
56	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp	452.690.000

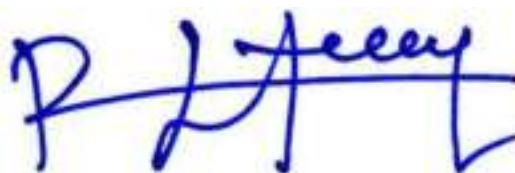
57	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Rp	85.535.000
58	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp	343.605.000
59	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp	199.270.000
60	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Rp	73.845.000
61	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp	301.548.250
62	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.350.231.250
63	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	48.713.950
64	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	81.142.250
65	Program pengendalian kebakaran hutan	Rp	665.763.450
66	Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan	Rp	334.236.550
67	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp	1.020.976.000
68	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp	270.112.000
69	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp	53.515.000
70	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp	17.186.000
71	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Nagari*)	Rp	85.797.000
72	Program penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat	Rp	639.962.700
73	Program Keluarga Berencana	Rp	4.159.839.500
74	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	14.335.000
75	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Rp	112.474.500
76	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rp	91.250.000
77	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Rp	84.999.500
78	Program kerjasama informasi dengan mas media	Rp	36.307.500
79	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi dengan media masa *)	Rp	40.990.000
80	Program peningkatan daya saing koperasi dan UKM	Rp	522.543.000
81	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Rp	18.057.000
82	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp	34.810.000
83	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp	350.898.550
84	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rp	6.471.000
85	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Rp	715.535.500
86	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp	100.000.000
87	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp	125.385.000
88	Program Pembinaan dan Perasyarakatan Olah Raga	Rp	599.810.000
89	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp	92.491.500

90	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Daerah	Rp	35.109.500
91	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	22.476.750
92	Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp	280.125.000
93	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp	115.007.000
94	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp	1.686.222.500
95	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Rp	354.303.900
96	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Rp	57.115.000
97	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Rp	65.360.000
98	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelauatan	Rp	26.450.750
99	Program pengembangan kawasan budidaya perikanan	Rp	1.444.162.000
100	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp	57.160.000
101	Program Pengembangan dan Peningkatan Instalasi Pembenihan Ikan	Rp	122.910.000
102	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp	1.209.151.950
103	Program pengembangan destinasi pariwisata	Rp	3.717.233.500
104	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp	760.000.000
105	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	586.859.650
106	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp	973.520.000
107	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Rp	482.293.500
108	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp	93.390.000
109	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp	752.821.000
110	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Pembangunan Pertanian/Peternakan/Perkebunan	Rp	600.000.000
111	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp	2.068.842.500
112	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar	Rp	2.029.910.000
113	Program pengembangan perdagangan	Rp	32.171.750
114	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp	218.649.650
115	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	Rp	72.598.000
116	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal	Rp	15.100.000
117	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Rp	2.521.400.000
118	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	518.857.000
119	Program Optimalisasi Lelang terpadu	Rp	629.056.000
120	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Rp	852.476.200
121	Program Koordinasi Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kerja	Rp	527.823.500

122	Program Koordinasi Pemerintahan dan Otda	Rp	674.391.800
123	Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	Rp	2.305.201.206
124	Program Koordinasi Perekonomian Dan SDA	Rp	427.826.200
125	Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	502.823.000
126	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 3	Rp	20.904.486.000
127	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp	2.494.963.500
128	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp	540.925.000
129	Program perencanaan kota-kota menengah dan besar	Rp	83.050.000
130	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp	1.127.106.000
131	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Rp	92.585.200
132	Program perencanaan sosial dan budaya	Rp	225.182.800
133	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah*)	Rp	34.500.000
134	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rp	47.529.800
135	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp	2.246.701.800
136	Program Pendidikan Kedinasan *)	Rp	224.186.000
137	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur *)	Rp	462.811.650
TOTAL		Rp	512.680.773.319

Pulau Punjung, 2020

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE